

Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
 2. Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memiliki Unit Syariah; dan
 4. Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menjual paket investasi syariah,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195) perlu untuk mengatur ketentuan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa

dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah
4. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
6. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
7. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
9. Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK.
10. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
11. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
12. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
13. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun

untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.

14. Data elektronik adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. Laporan Berkala Dana Pensiun terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Dana Pensiun, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan teknis.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. Data Elektronik.
4. Laporan Berkala bagi Dana Pensiun Syariah terdiri atas Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Laporan Berkala bagi Unit Syariah terdiri dari Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan berupa laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
6. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
7. Bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
 - b. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK berdasarkan Prinsip Syariah termasuk Unit Syariah, yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IB;
 - c. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IC; dan
 - d. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format ID.
8. Bagi DPLK berdasarkan Prinsip Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIA;
 - b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIB; dan
 - c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format IIC.
9. Bagi DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1

mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai bentuk dan susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, dengan penambahan informasi mengenai Paket Investasi Syariah dalam Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, atau mengalami gangguan teknis, Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Dana Pensiun Syariah harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Dana Pensiun mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala.
4. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis, atau Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring), Laporan Berkala disampaikan secara luar jaringan (luring) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa

compact disk (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus/pelaksana tugas pengurus dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (luring), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak Laporan Berkala yang telah disampaikan oleh Dana Pensiun Syariah dan Unit Syariah melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA Pensiun

YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM Pensiun

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

K e p a d a

Yth. Direktur IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / DATA ELEKTRONIK
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH /
UNIT SYARIAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI SYARIAH					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Syariah Negara	1106				
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana Syariah	1111				
MTN Syariah	1112				
Efek Beragun Aset Syariah	1113				
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
- Iuran Tambahan					
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Dana Tazir	1507				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Negara			
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Daerah			
Reksa Dana Syariah			
MTN Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL			
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Dana Tazir			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus,Dewan Pengawas, dan DPS			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Penerimaan Dana Ta'zir			
Pengeluaran Dana Ta'zir			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan Iuran Normal Peserta			
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta			
Penerimaan Iuran Tambahan			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			
(4) Jumlah Perusahaan Mitra Pendiri Dana Pensiun			

Kekayaan Untuk Pendanaan
Per DD-MM-YYYY

Uraian		Nilai
Tingkat bunga aktuarial%		
Nilai Aset Neto berdasarkan laporan keuangan audited*		
Pengurang		
1	Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
2	Iuran, yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya	
	a. Iuran Peserta	
	b. Iuran Pemberi Kerja	
	c. Iuran Tambahan	
	Total	
3	Piutang Lain-Lain	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
4	Aset Lain-Lain	
	a.	
	b.	
	c. dst.	
	Total	
5	Tingkat bunga aktuarial	
	Total	
Total Pengurang		
Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		

*: laporan keuangan audited hanya untuk tahunan

PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Syariah Negara												
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Daerah												
Reksa Dana Syariah												
MTN Syariah												
Efek Beragun Aset Syariah												
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi				Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan					
Tabungan pada Bank									
Deposito on call pada Bank									
Deposito berjangka pada Bank									
Sertifikat deposito pada Bank									
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Syariah Negara									
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Daerah									
Reksa Dana Syariah									
MTN Syariah									
Efek Beragun Aset Syariah									
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif									
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif									
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
REPO									
Penyertaan langsung									
Tanah di Indonesia									
Bangunan di Indonesia									
Tanah dan Bangunan di Indonesia									
Total									

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSUNJUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi				Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan					
Tabungan pada Bank									
Deposito on call pada Bank									
Deposito berjangka pada Bank									
Sertifikat deposito pada Bank									
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Syariah Negara									
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Daerah									
Reksa Dana Syariah									
MTN Syariah									
Efek Beragun Aset Syariah									
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif									
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif									
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
REPO									
Penyertaan langsung									
Tanah di Indonesia									
Bangunan di Indonesia									
Tanah dan Bangunan di Indonesia									
Total									

Keterangan:
Kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENJUALAN MANFAAT PASTI
REKAPTULASI ASET DAN LIABILITAS
Per DD-MM-YYYY

	(dalam rupiah)									
	jatuh tempo < 1 tahun		1 tahun ≤ jatuh tempo < 5 tahun		5 tahun ≤ jatuh tempo < 10 tahun		jatuh tempo ≥ 10 tahun		Total	
	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Total
A. Aset Investasi										
Tabungan pada Bank										
Deposito on call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Syariah Negara										
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Daerah										
Reksa Dana Syariah										
MTN Syariah										
Efek Beragun Aset Syariah										
Dana Investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total Investasi										
B. Aset Lancar di luar Investasi										
Kas dan Bank										
Piutang Iuran										
Iuran Normal Pemberi Kerja										
Iuran Sukarela Peserta										
Iuran Tambahan										
Beban Dibayar di Muka										
Piutang Investasi										
Piutang Hasil Investasi										
Piutang Lain-lain										
Total Aset Lancar Diluar Investasi										
C. Aset Operasional										
Tanah dan Bangunan										
Kendaraan										
Peralatan Komputer										
Peralatan Kantor										
Aset Operasional Lain										
Total Aset Operasional										
D. Aset lain-lain										
E. Total Aset (A+B+C+D)										
F. Nilai Kini Aktuarial										
G. Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial										
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo										
Utang Manfaat Sukarela										
Utang Dana Tazir										
Utang Investasi										
Pendapatan Diterima di Muka										
Beban yang Masih Harus Dibayar										
Utang Lain										
Total Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial										
H. Total Liabilitas (F+G)										
I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H)										
J. Penetase (%) Rasio Kecukupan Dana										

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahkan		Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi	Investasi		
a	b	c	d	e	f	g	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:

Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun Syariah/ unit syariah. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari

- a. Saham Syariah dengan emiten yang teridentifikasi pailit
- b. Reksa Dana Syariah yang teridentifikasi diperdagangkan secara tidak wajar
- c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
- d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang dibawah investment grade.
- e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Sukuk korporasi ataupun bagi hasil Deposito.
- f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
- g. Surat utang yang direstrukturisasi
- h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RINGAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBSN DAN INFRASTRUKTUR

No	SBSN		SUKUK INFRASTRUKTUR					REKSADANA UNDERLYING SBSN				REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS				EFEK BERAGUN ASET				INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH			
	Nama Jenis Investasi	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar	% SBSN dalam Reksadana	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Saldo
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
....																							
Total																							

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
B. Rata-rata investasi				3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
C. Rasio (A/B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. (Total Pendapatan Investasi+Pendapaatn diluar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban diluar Investasi dan operasional)				5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A/B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Kekukupan Dana (RKD)				
A. Kekayaan Untuk Pendanaan (KUP) x 100%				
B. Nilai Kini Aktuarial (NKA)				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Umur Piutang luran (RUPI)				
A. Piutang luran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. luran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A/B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A/B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. $(SPI_t - SPI_{t-1}) \times 100\%$				
B. SPI_{t-1}				
C. Rasio (A/B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A/B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Likuiditas minimum/cash ratio				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A/B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Piutang luran terhadap Aset Neto				
A. Piutang luran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang luran Pendiri (Piutang luran Pemberi Kerja + luran Tambahan)				
A. (Total Piutang luran Pendiri t1 - total Piutang luran Pendiri t0) X 100%				
B. total Piutang luran Pendiri t0				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A/B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A-B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PMPM dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A/B)				
Rasio Beban Usaha				1)Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2)Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3)Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A/B)				

Format Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi) n	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.							
					2.							
					3. dst							
2					1.							
					2.							
					3. dst							
dst.					1.							
					2.							
					3. dst							
Total												

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi			Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai	h	i				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	b	c	d	e	f	g				j	k	l	m	n	o	p
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
...																
Total																

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERTAGAS SYARIAH NEGARA

No	Kode Surat Bertagas	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM SYARIAH

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SUKUK KORPORASI

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk Daerah	Nama Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana Syariah *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelblaan		Keterangan
									Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf d:
Dilisi dengan Jenis Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN MTN SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat			Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi			Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	Awal	Akhir	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Total																				

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK SYARIAH YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	Counterparty	Jenis Jaminan (SSSN/SPIS)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSE/BS4)	Nilai Perolehan	Margin		Amortized Cost	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			o	p		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan (1)	Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan Per tanggal laporan			Nilai Appraisal/wajar			Selisih Penilaian Investasi			Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan (v)								Presentase Kepemilikan (e1)					Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya
	Swakelola/KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensiun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya	Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung (2)	Total Modal Disetor Anak Penyertaan dari Penyertaan Langsung	Pendiri	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Ttipan		
	s	t	u	v	w	x	y	z	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	i1	j1	k1
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

*) hurufe :
Diisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Apraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KUPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Persun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Totol																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PIUTANG IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiiri)	Piutang Iuran Pemberi Kerja		Piutang Iuran Peserta		Piutang Iuran Tambahan			Piutang Iuran Sukarela Peserta	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan		
		Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total	Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah& Bangunan)	Nomor Sertipikat	Alamat Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan pada tanggal laporan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT Pensiun Jatuh Tempo

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT Pensiun Sukarela Jatuh Tempo

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG DANA TA'ZIR

Rincian	Jumlah	Keterangan
A. Saldo Awal		
B. Penambahan Tahun Berjalan		
C. Penggunaan Tahun Berjalan		
1 Nama Penerima 1		
2 Nama Penerima 2		
3 ... dst.		
D. Saldo Akhir (A+B-C)		

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran Jatuh Temp

No.	Nama Pendiiri/ Mitra Pendiiri	PHDP	Iuran Jatuh Tempo						Penerimaan Iuran				Kurang/Lebih bayar			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta		Iuran Normal Pemberi Kerja		Iuran Sukarela Peserta	Iuran Tambahan	Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Sukarela Peserta	Iuran Tambahan	Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Tambahan		
			Iuran %	Jumlah	Iuran %	Jumlah											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

Rincian Pendapatan Di Luar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Di Luar Investasi	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban di Luar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

K e p a d a

Yth. Direktur IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / DATA ELEKTRONIK
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH /
UNIT SYARIAH
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI SYARIAH					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Syariah Negara	1106				
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana Syariah	1111				
MTN Syariah	1112				
Efek Beragun Aset Syariah	1113				
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang manfaat sukarela	1502				
Utang Dana Ta'zir	1507				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM Pensiun Iuran PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Negara			
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Daerah			
Reksa Dana Syariah			
MTN Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Dana Ta'zir			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Penerimaan Dana Ta'zir			
Pengeluaran Dana Ta'zir			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan Iuran Normal Peserta			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			
(4) Jumlah Perusahaan Mitra Pendiri Dana Pensiun			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Bank Indonesia												
Surat Berharga Syariah Negara												
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Daerah												
Reksa Dana Syariah												
MTN Syariah												
Efek Beragun Aset Syariah												
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSUIN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi				Hasil investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan					
Tabungan pada Bank									
Deposito on call pada Bank									
Deposito berjangka pada Bank									
Sertifikat deposito pada Bank									
Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Syariah Negara									
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Daerah									
Reksa Dana Syariah									
MTN Syariah									
Efek Beragun Aset Syariah									
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif									
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif									
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
REPO									
Penyertaan langsung									
Tanah di Indonesia									
Bangunan di Indonesia									
Tanah dan Bangunan di Indonesia									
Total									

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan
Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi				Hasil investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan					
Tabungan pada Bank									
Deposito on call pada Bank									
Deposito berjangka pada Bank									
Sertifikat deposito pada Bank									
Surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Syariah Negara									
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
Sukuk Daerah									
Reksa Dana Syariah									
MTN Syariah									
Efek Beragun Aset Syariah									
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif									
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif									
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia									
REPO									
Penyertaan langsung									
Tanah di Indonesia									
Bangunan di Indonesia									
Tanah dan Bangunan di Indonesia									
Total									

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan
Nilai Investasi pada sheet LPAN

(dalam rupiah)													
Uraian	jatuh tempo < 1 tahun		1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun		5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun		jatuh tempo >= 10 tahun		Total		Total		
	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	
A. Aset Investasi													
Tabungan pada Bank													
Deposito on call pada Bank													
Deposito berjangka pada Bank													
Sertifikat deposito pada Bank													
Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia													
Surat Berharga Syariah Negara													
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia													
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia													
Sukuk Daerah													
Reksa Dana Syariah													
MTN Syariah													
Efek Beragun Aset Syariah													
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif													
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif													
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia													
REPO													
Penyertaan langsung													
Tanah di Indonesia													
Bangunan di Indonesia													
Tanah dan Bangunan di Indonesia													
Total Investasi													
B. Aset Lancar di Luar Investasi													
Kas & Bank													
Piutang Iuran													
Iuran Normal Pemberi Kerja													
Iuran Normal Peserta													
Iuran Sukarela Peserta													
Beban Dibayar di Muka													
Piutang Investasi													
Piutang Hasil Investasi													
Piutang Lain-Lain													
Total Aset Lancar di Luar Investasi													
C. Aset Operasional													
Tanah dan Bangunan													
Kendaraan													
Peralatan Komputer													
Peralatan Kantor													
Aset Operasional Lain													
Total Aset Operasional													
D. Aset Lain-Lain													
E. Total Aset (A+B+C+D)													
F. Liabilitas Manfaat Pensiun													
G. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun													
Uang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo													
Uang Manfaat Sukarela													
Uang Dana Ta'zir													
Uang Investasi													
Pendapatan Diterima di Muka													
Beban yang Masih Harus Dibayar													
Uang lain													
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun													
H. Total Liabilitas (F+G)													
I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H)													
J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana													

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahannya		Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi	Investasi		
a	b	c	d	e	f	g	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:

Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun Syariah/ unit syariah. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari

- a. Saham Syariah dengan emiten yang terindikasi pailit
- b. Reksa Dana Syariah yang terindikasi diperdagangkan secara tidak wajar
- c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
- d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang dibawah investment grade.
- e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Sukuk ataupun bagi hasil Deposito.
- f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
- g. Surat utang yang direstrukturisasi
- h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

No	SBN		SUKUK INFRASTRUKTUR					REKADANA UNDERLYING SBN					REKADANA PERVERTAAN TERBATAS					EFEK BERAGUN ASET					INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH		
	Nama Jenis Investasi	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar	% SBN dalam Reksadana	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Saldo		
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
....																									
Total																									

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
A. (Total Pendapatan Investasi+Pendapaatn diluar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban diluar Investasi dan operasional)				
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A:B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPi)				
A. Piutang Iuran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. Iuran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A:B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. (SPI _n -SPI _{n-1}) x 100%				
B. SPI _{n-1}				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Likuiditas minimum/cash ratio				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A:B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Piutang Iuran terhadap Aset Neto				
A. Piutang Iuran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang Iuran Pendiri (Piutang Iuran Pemberi Kerja + Iuran Tambahan)				
A. (Total Piutang Iuran Pendiri t1 - total Piutang Iuran Pendiri t0) X 100%				
B. total Piutang Iuran Pendiri t0				
C. Rasio (a:b)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A-B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Beban Usaha				1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3) Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A:B)				

DANA PENSIUN
LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA

[illegible]

Format Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi) n	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.							
					2.							
					3. dst							
2					1.							
					2.							
					3. dst							
dst.					1.							
					2.							
					3. dst							
Total												

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	k
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi			Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai	h	i				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	b	c	d	e	f	g				j	k	l	m	n	o	p
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
...																
Total																

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM SYARIAH

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SUKUK KORPORASI

No	Nama Emiten/ Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor/Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk Daerah	Nama Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor/Ekonomi	Program Pensiun/Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana Syariah *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Nilai	%	l	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
1									j	k		m	n	o
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf di:
Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN MTN SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	Awal	Akhir	k	l	m	n	o	p	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET SVARIAH

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK SYARIAH YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	Counterparty	Jenis Jaminan (SBSN/SBIS)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSE/BIS4)	Nilai Perolehan	Margin		Amortized Cost	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Persiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan (1)		Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan		Penempatan Awal		Nilai Perolehan Pertanggal laporan			Nilai Appraisal/wajar			Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
			Nama	Jabatan				Tanggal	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan (v)								Total Modal Disetor Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung (2)	Presentase kepemilikan (e1)				Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya
	Swakelola/KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya	Pendiri		Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Titipan			
	s	t	u	v	w	x	y	z	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	i1	j1	k1
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			

*) huruf e : Disisi dengan LUK Dalam Negeri/Non LUK LUK Dalam Negeri/LUK Luar Negeri/Non LUK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi,)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Appraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
Total																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PIUTANG IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Iuran Pemberi Kerja			Piutang Iuran Peserta			Piutang Iuran Sukarela Peserta	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
		Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total	Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah &Bangunan)	Nomor Sertipikat	Alamat Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan pada tanggal laporan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT Pensiun Jatuh Tempo

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT Pensiun Sukarela Jatuh Tempo

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG DANA TA'ZIR

Rincian	Jumlah	Keterangan
A. Saldo Awal		
B. Penambahan Tahun Berjalan		
C. Penggunaan Tahun Berjalan		
1 Nama Penerima 1		
2 Nama Penerima 2		
3 ... dst.		
D. Saldo Akhir (A+B-C)		

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Investasi Lain	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan
 Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT I C
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

Nama Dana Pensiun	:	
Nomor Buku Daftar Umum (NBDU)	:	
Nomor SID	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	

B. Pendiri

Nama Pendiri	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	
j. Bidang Usaha Pendiri	:	
k. Status Kepemilikan Pendiri (BUMN/Non BUMN)	:	
l. Mitra Pendiri (Ada/Tidak)	:	

C. Penyelenggaraan

1. Kepengurusan	
a. Apakah terdapat perubahan Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pengurus selama periode kegiatan?	

Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
b. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun	
c. Apakah Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?	
d. Apakah Pengurus memiliki bukti keahlian di bidang keuangan syariah?	
e. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
f. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas Syariah atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah selama periode kegiatan?	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
g. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki surat rekomendasi dari DSN-MUI?	
h. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki surat Keputusan Pendiri atas penunjukan?	
i. Apakah jumlah dan komposisi Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah sudah sesuai dengan PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun?	
j. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat Bidang Investasi dan/atau Manajemen Risiko?	

2. Jumlah Karyawan Dana Pensiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD

:

SMP

:

SMA

:

Diploma

:

S1

:

S2

:

S3

:

Total

:

3. Daftar Nama dan Jabatan Karyawan Dana Pensiun yang Berada dibawah Struktur Organisasi Pengurus

No.	Nama	Jabatan

4. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:

a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan? Jika Ya, isi informasi nama Pengelola administrasi kepesertaan:

1

2

3

4

5 dst

b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan Jika Ya, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan

1

2

3

4

5 dst

c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi? Jika Ya, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)

1

2

3

4

5 dst

d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?	
Jika Ya, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:	
1	
2	
3	
4	
5 dst	
5. Iuran	
a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?	
b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?	
c. Apakah terdapat iuran sukarela dari Peserta?	
6. Manfaat Lain	
Apakah Dana Pensiun menyelenggarakan program Manfaat Lain bagi Peserta?	
7. Investasi	
a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	
b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?	
c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Arah Investasi Terakhir	
8. Tata Kelola	
a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?	
b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?	
c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman Tata Kelola	
D. Kepesertaan Dana Pensiun	
1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan::	
Pendiri (orang)	:
a. Program Pensiun	:
b. Manfaat Lain	:

Mitra Pendiri (orang)

:

a. Program Pensiun

:

b. Manfaat Lain

:

Total (orang)

:

a. Program Pensiun

:

b. Manfaat Lain

:

2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun pada akhir periode kegiatan

:

3. Struktur Usia Peserta Aktif program pensiun

a. Jumlah Peserta Aktif

s.d 20

:

20 s.d 30

:

30 s.d 40

:

40 s.d 50

:

di atas 50

:

b. Jumlah Peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun

s.d 20

:

20 s.d 30

:

30 s.d 40

:

40 s.d 50

:

di atas 50

:

Estimasi jumlah peserta program pensiun yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya

:

4. Jumlah Mitra Pendiri

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak Program Pensiun

Uraian	Jumlah	≤ Rp 1.600.000, 00	> Rp 1.600.000, 00	≤ Rp 500.000.000, 00	> Rp 500.000.000, 00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang	-				

memilih pembayaran pertama maksimum 20%)					
i. Pensiunan					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun perbulannya di bawah batas ketentuan menteri					
ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					

iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					
---	--	--	--	--	--

Pernyataan Pengurus

Kami Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun Oleh Dewan Pengawas

(substansi laporan diisi dan ditandatangani oleh dewan pengawas dengan mempertimbangkan Kewajaran Alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian Kinerja Investasi Dana Pensiun dengan Arahkan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan)

Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Jabatan Dewan Pengawas)

III. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahnya Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahnya Berdasarkan Prinsip Syariah

a. Pengurus DPPK

- 1) Jumlah, nama, jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pengurus DPPK

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Keputusan				
1.								
2.								
Dst								

- 2) Rangkap jabatan Pengurus DPPK

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

- 3) Frekuensi rapat Pengurus DPPK yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pengurus (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Pengurus DPPK dengan sesama Pengurus dan/ atau anggota Dewan Pengawas DPPK di Dana Pensiun tempat anggota Pengurus DPPK dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Pengurus Lainnya			Dewan Pengawas		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

b. Dewan Pengawas

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

- 3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)	% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran	

			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas lain dan /atau anggota Pengurus DPPK, tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pengurus DPPK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* *Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb*

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

- 3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadir an
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi /Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, anggota Pengurus DPPK, dan/atau anggota Dewan Pengawas tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Sesama Dewan Pengawas Syariah Lainnya			anggota Pengurus DPPK			anggota Dewan Pengawas		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst										

Keterangan:

* Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas
Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Hasil Pengawasan	Rekomendasi

* Diisi dengan rincian penilaian Dewan Pengawas tentang penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Dana Pensiun

e. Komite-Komite
1) Fungsi di bawah Pengurus DPPK

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi Audit internal	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

f. Penerapan fungsi audit eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas *)			

Keterangan:

* Tanggal Penunjukkan oleh Dewan Pengawas

- g. Penerapan kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan.

Jumlah anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan yang menerima paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pengurus DPPK	Jumlah Dewan Pengawas	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar				
Rp500 juta ke bawah				

Keterangan:

* yang diterima secara tunai

- h. Alih Daya Pengelolaan Investasi *)

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

Keterangan:

* Dana Pensiun hanya melakukan Alih Daya Pengelolaan Investasi dalam bentuk KPD

- i. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian audit eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait **)			
3.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung.			
4.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
5.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
6.	Dana Pensiun memiliki audit internal			
7.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
9.	Dana Pensiun memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

- * pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”
- ** Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. **Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun**

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban "A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban "A/Tidak".

A. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai	A	B	C	D	E
2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain:					
2.1.Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.	A	B	C	D	E
2.2.Kebijakan bagi organ Dana Pensiun.	A	B	C	D	E
2.3.Kebijakan bagi pegawai.	A	B	C	D	E
2.4.Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun.	A	B	C	D	E
2.5.Kebijakan bagi mitra usaha.	A	B	C	D	E
2.6.Kebijakan bagi sesama dana pensiun.	A	B	C	D	E
3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis.	A	B	C	D	E
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.Benturan kepentingan.	A	B	C	D	E
4.2.Pemberian hadiah dan donasi.	A	B	C	D	E
4.3.Kepatuhan terhadap peraturan.	A	B	C	D	E
4.4.Kerahasiaan informasi.	A	B	C	D	E
4.5.Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor.	A	B	C	D	E

5. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun :

5.1.Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan.

TidakYa

5.2.Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan Dana-Pensiun.

TidakYa

5.3.Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

TidakYa

6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun.

TidakYa

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.

A B C D E

B. ORGAN DANA PENSIUN

a. Pendiri dan Mitra Pendiri

Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

- 1.1.internal kontrol.

A B C D E
- 1.2.manajemen risiko.

A B C D E
- 1.3.implementasi GCG.

A B C D E
- 1.4.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

A B C D E

b. Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

1.1.Jumlah anggota Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak	Ya
1.2.Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti :		
1.2.a Bidang investasi.	Tidak	Ya
1.2.b Bidang Manajemen risiko.	Tidak	Ya
2. Persyaratan Pengurus		
2.1.Anggota Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar.	Tidak	Ya
2.2.Anggota Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas.	Tidak	Ya
2.3.Anggota Pengurus harus memahami dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	A	B C D E
2.4.Anggota Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun.	Tidak	Ya
2.5.Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama.	Tidak	Ya
2.6.Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan anak tempat penyertaan dana pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Tidak	Ya
2.7.Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana	Tidak	Ya

tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
atau DPS pada Dana Pensiun lain.

3. Fungsi Pengurus

3.1. Kepengurusan

- 3.1.1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun.

A B C D E
- 3.1.2. Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.

A B C D E
- 3.1.3. Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.

A B C D E
- 3.1.4. Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) yang diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

A B C D E
- 3.1.5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.

TidakYa

3.2. Manajemen Risiko

- 3.2.1 Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang

A B C D E

mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun.

3.2.2 Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	Tidak	Ya
---	--------------	-----------

3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal.	Tidak	Ya
3.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri.	Tidak	Ya

3.4. Teknologi Informasi

3.4.1. Dana Pensiun memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu.		
3.4.2. Dana Pensiun memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> untuk bagian Teknologi Informasi.		

4. Pertanggungjawaban Pengurus

4.1. Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan.	Tidak	Ya
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :		
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :		
a. Laporan keuangan.	Tidak	Ya
b. Laporan kegiatan Dana Pensiun.	Tidak	Ya
c. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	Tidak	Ya
4.2.2. Mendapat persetujuan Pendiri dan Mitra Pendiri.	Tidak	Ya
4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri dan Mitra Pendiri.	Tidak	Ya
4.3. Rapat Pengurus		

4.3.1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPPK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.	Tidak	Ya			
4.3.2. Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Tidak	Ya			
4.3.3. Pengurus menetapkan tata tertib rapat.	Tidak	Ya			
4.3.4. Setiap rapat Pengurus dibuat risalah rapat.	Tidak	Ya			
4.3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada).	A	B	C	D	E
4.3.6. Setiap anggota Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan Risalah Rapat Pengurus.	Tidak	Ya			

c. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak	Ya
1.2. Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya.	Tidak	Ya
1.3. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus atau DPS pada Dana Pensiun yang sama, atau Dewan	Tidak	Ya

pengawas, Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang lain.

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 2.1. Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i> . | Tidak | Ya |
| 2.2. Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. | A | B |
| | C | D |
| | E | |
| 2.3. Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun. | Tidak | Ya |

3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas

- | | | | | | |
|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 3.1. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun. | A | B | C | D | E |
| 3.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen. | Tidak | Ya | | | |
| 3.3. Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | Tidak | Ya | | | |
| 3.4. Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat. | Tidak | Ya | | | |
| 3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat. | A | B | C | D | E |
| 3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas. | Tidak | Ya | | | |

d. Dewan Pengawas Syariah

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. | Tidak | Ya |
| 1.2. merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pengangkatannya harus dinyatakan secara jelas dalam surat keputusan Pendiri. | Tidak | Ya |
| 1.3. Seluruh Dewan Pengawas Syariah terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya. | Tidak | Ya |
| 1.4. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus DPPK atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama. | Tidak | Ya |
| 1.5. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya. | Tidak | Ya |

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas Syariah

- | | | | | | |
|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2.1. Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i> . | Tidak | Ya | | | |
| 2.2. Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. | A | B | C | D | E |
| 2.3. Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun. | Tidak | Ya | | | |

3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK. | A | B | C | D | E |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|

3.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.	A	B	C	D	E
3.3. Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tidak			Ya	
3.4. Setiap rapat Dewan Pengawas Syariah dibuat risalah rapat.	Tidak			Ya	
3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat.	A	B	C	D	E
3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.	Tidak			Ya	
3.7. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun.	Tidak			Ya	
3.8. Dalam hal jumlah DPS adalah 1 (satu) orang maka rapat DPS dilakukan bersama dengan rapat Dewan Pengawas Dana Pensiun.	Tidak			Ya	
4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)	Tidak			lanjutkan	
4.1. Komite Audit	Ada			ke 4.1.7.	
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:					
4.1.1. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.	A	B	C	D	E

- 4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. **A B C D E**
- 4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen. **A B C D E**
- 4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. **Tidak Ya**
- 4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen. **A B C D E**
- 4.1.6. Anggota Komite Audit terdiri dari :
- anggota Dewan Pengawas **Tidak Ya**
 - pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus Dana Pensiun, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. **Tidak Ya**
- 4.1.7. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik. **A B C D E**
 - Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. **A B C D E**

- c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E
- d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Tidak

Ya
- e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E

4.2. Komite Pemantau Risiko

Tidak
Ada

lanjutkan
ke 4.2.4.

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

- 4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko.

A

B

C

D

E
- 4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus.

A

B

C

D

E
- 4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta.

Tidak

Ya

b. pihak lain.

Tidak

Ya
- 4.2.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko.

A

B

C

D

E

b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus.

A

B

C

D

E

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak
Ada

lanjutkan
ke 4.3.4.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

- 4.3.1. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun.

A B C D E
- 4.3.2. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem Remunerasi.

A B C D E
- 4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas.

Tidak Ya

b. pihak lain.

Tidak Ya
- 4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun.

A B C D E

b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem Remunerasi.

A B C D E

C. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan keuangan Dana Pensiun.

Tidak Ya
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak Ya

3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti Fraud

Nama Dana Pensiun).....

LAPORAN PENGENDALIAN FRAUD DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD
TAHUN

a. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Jenis Fraud a)	Tanggal terjadi Fraud d	Divisi/Bagian Terjadi-nya Fraud	Pihak yang terlibat b)	Jabatan	Kerugian dalam rupiah c)	Tindakan Dana Pensiun d)	Kelemahan/ Penyebab Terjadi-nya Fraud e)	Tindak Lanjut / Perbaikan f)	Kronologis kejadian Fraud g)

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

- 1) Pencegahan:
.....
.....
.....
- 2) Deteksi:
.....
.....
.....
- 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:
.....
.....
.....
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:
.....
.....

.....

.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Dana Pensiun, atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Dana Pensiun merupakan respon Dana Pensiun atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Dana Pensiun yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Dana Pensiun.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Dana Pensiun terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

IV. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Nama Dana Pensiun	:	
Skema Penyelenggaraan	:	[1] Syariah Penuh (<i>Full Fledged</i>)
PPBS		[2] Unit Syariah DPPK
		[3] Paket Investasi Syariah DPLK
Periode Laporan	:	s.d.
Tanggal Laporan	:	

INFORMASI UMUM

1.

Nama Dana Pensiun

:
2.

Jenis Dana Pensiun

:

(1) DPPK PPMP

(2) DPPK PPIP

(3) DPLK
3.

Skema Penyelenggaraan
PPBS

:

(1) Syariah Penuh (*Full Fledged*)

(2) Unit Syariah DPPK

(3) Paket Investasi Syariah DPLK
4.

Alamat Dana Pensiun

:
5.

Susunan DPS

:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Surat Keputusan Penunjukan DPS	
			Nomor	Tanggal
1.				
2.				
dst				

6.

Ringkasan korespondensi dan/atau notulen rapat terkait hasil pelaksanaan
pengawasan DPS

No	Korespondensi dan/atau notulen rapat			Ringkasan Substansi
	Nomor	Tanggal	Hal	
1.				
2.				
dst				

7.

Informasi mengenai penyusun laporan (*contact person*):

a.

Nama

:

b.

Jabatan

:

c.

Nomor Telepon

:

d.

Alamat E-mail

:

PERNYATAAN DPS

a. APABILA TIDAK DITEMUKAN PRAKTIK YANG MELANGGAR

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan PPBS yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..... selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek Manfaat Pensiun, aspek Manfaat Lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..... telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Tanda Tangan

b. APABILA DITEMUKAN PRAKTIK YANG BELUM SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan PPBS yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek Manfaat Pensiun, aspek Manfaat Lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..... telah melakukan praktik pengelolaan yang belum sesuai Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..... belum sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ringkasan Praktik yang Belum Sesuai dengan Prinsip Syariah

No.	Praktik	Periode Kejadian	Faktor Penyebab	Keterangan

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

RINGKASAN HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kami terhadap penerapan Prinsip Syariah dalam operasional penyelenggaraan PPBS pada Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPPK..... selama periode tanggal.....sampai dengan....., dapat disampaikan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Akad yang Digunakan

<u>Pokok Materi 1:</u> Kesesuaian Akad yang digunakan dengan kegiatan PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penggunaan Akad dalam kegiatan PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penetapan <i>ujrah</i> /nisbah yang wajar dan transparan dalam kegiatan PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

B. Pengelolaan Iuran

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur kepesertaan pada PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penerapan sistem dan prosedur pengenaan sanksi (<i>ta'zir</i>) dan penggunaan Dana <i>Ta'zir</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

C. Penempatan Investasi

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan investasi PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pengelolaan investasi PPBS dalam hal terdapat investasi PPBS yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> Pencatatan investasi PPBS	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

D. Pembayaran Manfaat Pensiun

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Pensiun	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

<u>Pokok Materi 2 :</u> Penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

E. Manfaat Lain (jika ada)

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan dana iuran atas Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi atas Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	

Rekomendasi:

<u>Pokok Materi 4:</u> Penghitungan dan pembayaran Manfaat Lain telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau telah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

F. Kegiatan Lainnya

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan kekayaan PPBS selain investasi	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pencatatan dan pengadministrasian rekening Peserta PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> penerapan kegiatan-kegiatan lainnya yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, termasuk fatwa-fatwa DSN MUI	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

V. **Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus Dan Pegawai Yang Membidangi Investasi**

FORM :										
		OTORITAS JASA KEUANGAN FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI								
Nama Dana Pensiun		:								
Nomor Surat Pelaporan		:								
Tanggal Surat Pelaporan		:								
Contact Person (Nama, Telp/e-mail)		:								
NO	URAIAN				DASAR HUKUM		YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.				o POJK 3/POJK.05/2015 o POJK 5/POJK.05/2018 o POJK 29/POJK.05/2018		☐	☐		
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan						☐	☐		
Keterangan tambahan (bila diperlukan):										
No	Nama	Jenis Pihak Utama *) ***)	No dan tanggal SK FPT**)	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahunan	Bukti pemenuhan *)
		o Pengurus o Pegawai		o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan		o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri o asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang				sertifikat (nomor dan tanggal) bukti hadir lainnya, yaitu

				kursus, pelatiha n, atau program pendidik an sejenis						

- Keterangan:**
- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
 - 2. *) Pilih salah satu
 - 3. **) Khusus untuk pengurus
 - 4. ***) untuk seluruh pegawai yang membidangi investasi
 - 5. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
 - 6. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

FORMAT I D**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA YANG MENJALANKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH****A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan**

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

- a. Laporan Aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

- 1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:

 - Nama Aktuaris;
 - Nama Kantor Aktuaris;
 - Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
 - No. STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

1.2 Penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan.

1.3 Penegasan mengenai:

 1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
 2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
 3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus

yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan

1.4 Penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.

1.5 *Pension Cost Sharing/non cost sharing (Pilih salah satu)*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.

2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.

4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan

5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Pendiri dan Mitra Pendiri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;

2. sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan

3. dalam hal terdapat surplus digunakan untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal *sharing/non-sharing pension cost*

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)

Ttd.

Nama

3. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

6. Ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

Uraian	DD-MM-YYYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiun ditunda		
- Jana/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

7. Metode Valuasi Aktuaria Dan Asumsi Aktuaria Yang Digunakan

Uraian	DD-MM-YYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYY (periode sebelumnya)
Metode Perhitungan Aktuaria		
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial		
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas		
Asumsi Ekonomis		
Tingkat Inflasi		
Tingkat Bunga		
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun		
Tingkat kenaikan manfaat pensiun		
Asumsi Demografis		
Tingkat mortalitas masa aktif		
Tingkat mortalitas masa pensiun		
Tingkat kecacatan		
Tingkat pengunduran diri		
Asumsi Lain-lain		

Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)		
Selisih usia suami istri		
Biaya pengelolaan program pensiun		

Alasan pemilihan metode valuasi aktuaria dan asumsi aktuaria

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuaria secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuaria

Uraian	DD-MM-YYYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		
Kekayaan		
Kekayaan untuk pendanaan		
Kewajiban		
Liabilitas Solvabilitas		
Nilai Kini Aktuarial		
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit		
Posisi Pendanaan		
Surplus		
Kelebihan surplus		
Periode penggunaan surplus		
Total Defisit		
Defisit pra undang-undang		
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Defisit luar yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Analisis:		
Tingkat kualitas Pendanaan		
Rasio Pendanaan		
Rasio Solvabilitas		
Iuran		
Iuran Normal		
Tahun Pertama (Rp)		
Tahun-tahun selanjutnya		

Iuran Normal Peserta (%)		
Iuran Normal Pemberi Kerja (%)		
Total		
Iuran Tambahan		
Iuran Per bulan		
Masa angsuran (bulan)		
c. Hasil Valuasi Aktuarial secara keseluruhan		

9. Proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama

10. Nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya

b. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:

- Nama Aktuaris;

- Nama Kantor Aktuaris;

- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;

- Nomor STTD Konsultan Aktuarial (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

--

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

Uraian	DD-MM-YYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiunan ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

6. Tingkat bunga yang digunakan

7. Proyeksi Cash Flow

8. Analisis Actuarial Gain or Loss

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

10. Tabel Konversi

11. Kesimpulan dan Saran

c. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:

- Nama Aktuaris;

- Nama Kantor Aktuaris;

- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;

- Nomor STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di

IKNB);

1.2 penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP.

1.3 penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP

1.4 *Pension Cost Sharing/ non cost sharing (Pilih salah satu)*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.

2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.

4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP;

5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

6. Nilai Aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat lain, dan kecukupan dana PMLMP; dan

7. Besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP untuk masing-masing pemberi kerja.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Pendiri/Mitra Pendiri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;

2. Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan

3. Dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP digunakan untuk mengurangi iuran PMLMP, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal *sharing/non-sharing pension cost*.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)

Ttd.

Nama

3. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

--

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

--

6. Ringkasan Jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

Uraian	DD-MM-YYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiunan ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

7. Metode Valuasi Aktuaria Dan Asumsi Aktuaria Yang Digunakan

Uraian	DD-MM-YYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYY (periode sebelumnya)
Metode Perhitungan Aktuaria		
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial		
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas		
Asumsi Ekonomis		
Tingkat Inflasi		
Tingkat Bunga		
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun		
Tingkat kenaikan manfaat pensiun		
Asumsi Demografis		
Tingkat mortalitas masa aktif		

Tingkat mortalitas masa pensiun		
Tingkat kecacatan		
Tingkat pengunduran diri		
Asumsi Lain-lain		
Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)		
Selisih usia suami istri		
Biaya pengelolaan program pensiun		

Alasan pemilihan metode valuasi aktuaria dan asumsi aktuaria

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuaria secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuaria

Uraian	DD-MM-YYYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		
Kekayaan		
Kekayaan untuk pendanaan		
Kewajiban		
Liabilitas Solvabilitas		
Nilai Kini Aktuarial		
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit		
Posisi Pendanaan		
Surplus		
Kelebihan surplus		
Periode penggunaan surplus		
Total Defisit		
Defisit pra undang-undang		
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Defisit luar yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Analisis:		
Tingkat kualitas Pendanaan		
Rasio Pendanaan		
Rasio Solvabilitas		
Iuran		
Iuran Normal		

Tahun Pertama (Rp)		
Tahun-tahun selanjutnya		
Iuran Normal Peserta (%)		
Iuran Normal Pemberi Kerja (%)		
Total		
Iuran Tambahan		
Iuran Per bulan		
Masa angsuran (bulan)		
c. Hasil Valuasi Aktuaria secara keseluruhan		

9. nilai aset program dari PMLMP
-
10. uraian penetapan nilai aset program PMLMP
-
11. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP
-
12. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama
-
13. besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP
-

E. Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

 N a m a J e l a s
Jabatan

_____20xx

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

 N a m a J e l a s
Jabatan

DAFTAR ISI
FORMAT RENCANA BISNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Format 1	:	Profil Dana Pensiun Syariah/Unit Syariah
Format 2	:	Ringkasan Eksekutif
Format 3	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 4	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 5	:	Rencana Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 7	:	Rencana Investasi
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Proyeksi Laporan Keuangan;
Format 12	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan
Format 13	:	Informasi Lainnya

Format 1 : Profil Dana Pensiun

- 1. Informasi Umum Dana Pensiun
 - 1) Nama Dana Pensiun
 - 2) Kode Dana Pensiun
 - 3) SK Pengesahan
 - 4) Program
 - 5) Pengurus
 - 6) Dewan Pengawas
 - 7) Alamat Kantor
 - 8) Tanggal Pelaporan
 - 9) Tahun Rencana Bisnis

- 2. Struktur Organisasi Dana Pensiun

(Diisi dengan bagan struktur organisasi Dana Pensiun)

- 3. Informasi Umum Pendiri
 - 1) Nama Pendiri
 - 2) Alamat
 - 3) Direksi
 - 4) Dewan Komisaris
 - 5) Bergerak di bidang

Format 2 : Ringkasan Eksekutif

- 1. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....
- 2. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....
- 3. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....

Keterangan :

¹⁾ antara lain meliputi penguatan pendanaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan hasil

investasi Dana Pensiun, penurunan piutang Dana Pensiun, peningkatan manfaat pensiun atau manfaat lain, dan peningkatan efisiensi Dana Pensiun

4. Indikator Keuangan

(dalam satuan penuh rupiah)

No	Uraian	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset Neto				
2.	Investasi				
3.	Pendapatan Investasi				
4.	Beban Investasi				
5.	Beban Operasional				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.
X : tahun posisi rencana bisnis.

5. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Dana Pensiun

.....
.....
.....

** Uraian mengenai kondisi keuangan Dana Pensiun yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

6. Rasio Keuangan

No	Uraian	Kinerja Sept X-1 (%)	Proyeksi (%)		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
2.	Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)				
3.	Rasio Beban Operasional (BOPO)				
4.	Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
5.	Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)				
6.	Rasio Solvabilitas (Khusus PPMP)				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.
X : tahun posisi rencana bisnis.

Format 3 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

1. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun *(Abaikan jika Dana Pensiun anda Dana Pensiun baru dan/ atau pertama kali dalam penyampaian laporan rencana bisnis).*

(Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana bisnis setiap tahun. Pada bagian ini, Dana Pensiun dapat melihat kinerja Dana Pensiun pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Dana Pensiun.)

Indikator	20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	% Pencapaian
	(1)	(2)	(2/1)
Aset Neto			
Investasi			
Iuran:			
a. Iuran Normal Peserta			
b. Iuran Sukarela Peserta			
c. Iuran Normal Pemberi Kerja			
d. Iuran Tambahan			
Pembayaran Manfaat Pensiun			
Pendapatan Investasi			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Rasio Pendapatan Investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio Beban Operasional (BOPO)			
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)			
Rasio Pendanaan (khusus PPMP)			
Rasio Solvabilitas (khusus PPMP)			

2. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah*

.....
.....

* Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan solusi dari pemecahan masalah tersebut

3. Upaya Pemecahan Masalah*

.....

.....

.....

* Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah

Format 4 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Dana Pensiun *

.....

.....

.....

* Visi merupakan gambaran kondisi Dana Pensiun di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita Dana Pensiun. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Dana Pensiun ke depan.

2. Misi Dana Pensiun *

.....

.....

.....

* Misi merupakan penjabaran dari visi, dimana misi menjabarkan analisis yang cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh Peserta. Misi juga menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Dana Pensiun ke depan.

3. Strategi Bisnis Dana Pensiun

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
		Dst	
2.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
		Dst	
Dst			

Format 5 : Rencana Kegiatan Usaha

.....

.....

.....

.....

.....

(Rencana mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud)

Format 6 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha (Penambahan Manfaat Selain Manfaat Pensiun)

No	Jenis Manfaat Lain	Deskripsi Umum Manfaat Lain	Waktu Pelaksanaan Manfaat Lain	Tujuan Manfaat Lain	Risiko atas Pelaksanaan Manfaat Lain	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Manfaat Lain	Alasan dan Pertimbangan	Strategi

Keterangan:

- a. Rencana Penambahan Manfaat Lain meliputi rencana pelaksanaan Manfaat Lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Sesuai dengan POJK mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dapat diisi mengenai manfaat lain.

Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:

- a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau

b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti perubahan program pensiun bagi DPPK.

Format 7 : Rencana Investasi

1. Komposisi Investasi

1) Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Syariah Negara								
7.	Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Daerah								
10.	Reksa Dana Syariah								

11.	MTN Syariah								
12.	Efek Beragun Aset Syariah								
13.	Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif								
14.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
16.	REPO								
17.	Penyertaan langsung								
18.	Tanah di Indonesia								
19.	Bangunan di Indonesia								
20.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2) Berdasarkan Nilai Wajar

No	Jenis investasi	Aktual		Proyeksi					
		Per 30 Sept 20XX-1		Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								

4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Syariah Negara								
7.	Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Daerah								
10.	Reksa Dana Syariah								
11.	MTN Syariah								
12.	Efek Beragun Aset Syariah								
13.	Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif								
14.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang								

	tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
16.	REPO								
17.	Penyertaan langsung								
18.	Tanah di Indonesia								
19.	Bangunan di Indonesia								
20.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2. Rencana Hasil Investasi

[illegible]

19	Bangunan di Indonesia																
20	Tanah dan Bangunan di Indonesia																

3. Pertimbangan yang mendasari rencana investasi

.....
.....
.....

(Diisi dengan pertimbangan atau asumsi yang digunakan Pengurus sebagai dasar dalam menentukan rencana investasi sesuai dengan yang diatur dalam POJK tentang Investasi Dana Pensiun)

Format 8 : Rencana Pendanaan

Rencana Pendanaan bagi Dana Pensiun bermitra, perlu untuk diperinci hingga pada masing-masing mitra.

(Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri atau bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta)).

1. Rencana Pemenuhan Rasio Pendanaan

1) Tabel Rencana Pemenuhan Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)

Keterangan	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Kekayaan Untuk Pendanaan				
Nilai Kini Aktuaria				
Kewajiban Solvabilitas				
Surplus / Defisit				
Rasio Pendanaan (%)				
Rasio Solvabilitas (%)				
Kualitas Pendanaan*				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

* yang dimaksud dengan Kualitas Pendanaan adalah Kualitas pendanaan sebagaimana POJK 8/POJK.05/2018 pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut:

- (a). tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
- (b). tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
- (c). tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

2) Alasan dan Pertimbangan *

.....
.....
.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan Rasio Pendanaan

3) Strategi *

.....
.....
.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan Rasio Pendanaan

2. Proyeksi Pendanaan

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Iuran Normal Peserta				
Iuran Sukarela Peserta				
Iuran Normal Pemberi kerja				
Iuran Tambahan Pemberi kerja				
Total Dana Iuran				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis

Format 9 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

(Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat).

No	Perubahan Jaringan Kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Penggabungan				
1.				
2.				
C. Perubahan Alamat				
1.				
2.				
Dst				
D. Penutupan Kantor				
1.				
2.				
Dst				

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan
- ² Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/ Kotamadya
- ³ Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

Format 10 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi
- 1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi*
-
-
-

* Diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/ divisi, rencana perubahan satuan kerja/ divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....
.....
.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi

3) Strategi

.....
.....
.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi

2. Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Semester II 20XX-1		Semester I 20XX		Semester II 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)	(-)	(+)	(-)
1.								
2.								
Dst.								
Total								

* Diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia

3) Strategi*

.....
.....
.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia

3. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai

1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Materi/Topik	Nama Peserta	Jabatan	Sertifikasi yang telah dimiliki	Waktu Pelatihan
1.					
2.					
Dst.					

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....
.....
.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia

3) Strategi

.....
.....
.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....
.....
.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi*

.....
.....
.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

5. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi
1.				
2.				

.....
.....
.....

* *Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan/atau pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Dana Pensiun. Selain itu perlu diisi informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi.*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

Format 11 : Proyeksi Laporan Keuangan

1. Proyeksi Laporan Aset Neto untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
ASET				
INVESTASI				
Tabungan pada Bank				
Deposito on call pada Bank				
Deposito Berjangka pada Bank				
Sertifikat Deposito pada Bank				
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah Negara				
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Daerah				
Reksa Dana Syariah				
MTN Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Dana investasi real estat Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
REPO				
Penyertaan langsung				
Tanah di Indonesia				
Bangunan di Indonesia				
Tanah dan Bangunan di Indonesia				
TOTAL INVESTASI				
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
Kas dan Bank				
Piutang Iuran				
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Beban Dibayar Di Muka				
Piutang Investasi				
Piutang Hasil Investasi				
Piutang Lain-lain				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
ASET OPERASIONAL				
Tanah dan Bangunan				
Kendaraan				

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Peralatan Komputer				
Peralatan Kantor				
Aset Operasional Lain				
TOTAL ASET OPERASIONAL				
ASET LAIN-LAIN				
ASET TERSEDIA				
LIABILITAS				
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (PPMP)				
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (PIIP)				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo				
Utang Manfaat Sukarela				
Utang Dana Tazir				
Utang Investasi				
Pendapatan Diterima di Muka				
Beban Yang Masih Harus Di Bayar				
Utang Lain				
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial/Liabilitas Manfaat Pensiun				
TOTAL LIABILITAS				
ASET NETO				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.
- * Nominal Aset Neto sama dengan nominal Aset Neto Akhir Periode pada Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto

2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

Uraian	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi				
Iuran Jatuh Tempo:				
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Pendapatan di Luar Investasi				
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain				
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi				
Beban Operasional				
Beban di Luar Investasi dan Operasional				
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan				
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.
- * Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto

Format 12 : Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan

1. Rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya

(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				
Rasio beban operasional (BOPO)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
Rasio Pendanaan (RKD) khusus PPMP				
Rasio Solvabilitas khusus PPMP				

- Keterangan:
- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.

2. Asumsi Yang Digunakan

	URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX	Proyeksi		
			per 31 Des 20XX	per 30 Jun 20XX+1	per 31 Des 20XX+1
1.	Asumsi Tingkat Bunga Aktuaria (khusus PPMP) (%)				

2.	Asumsi Metode Perhitungan Aktuaria				
3.	Asumsi Tingkat Mortalita				
4.	Target tingkat hasil investasi dalam Arahkan Investasi (%)				
5.	dst (asumsi lain yang relevan)				

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.

Format 13 : Informasi Lainnya

<i>Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.</i> <i>Contoh:</i> <i>a. rencana pembubaran;</i> <i>b. rencana pembubaran mitra pendiri;</i> <i>c. rencana pengalihan kepesertaan;</i> <i>d. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan</i> <i>e. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.</i>

F. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

20xx

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

1. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1.

realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 5 dalam rencana bisnis dana pensiun;
2.

realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 6 dalam rencana bisnis dana pensiun;
3.

realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada Format 7 dalam rencana bisnis dana pensiun;
4.

realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada Format 8 dalam rencana bisnis dana pensiun;
5.

realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada Format 9 dalam rencana bisnis dana pensiun;
6.

realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Format 10 dalam rencana bisnis dana pensiun;
7.

realisasi atas proyeksi laporan keuangan, sebagaimana dimaksud pada Format 11 dalam rencana bisnis dana pensiun;
8.

realisasi atas proyeksi rasio-rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Format 12 dalam rencana bisnis dana pensiun; dan
9.

pengisian rencana bisnis berdasarkan laporan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK paling terakhir

2. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

- 1) Realisasi Laporan Aset Neto untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
ASET			
INVESTASI			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Negara			
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Daerah			
Reksa Dana Syariah			
MTN Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana investasi real estat Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
TOTAL INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
ASET TERSEDIA			
LIABILITAS			
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (PPMP)			
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun (PPIP)			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Dana Tazir			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Beban Yang Masih Harus di Bayar			
Utang Lain			
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial/ Liabilitas Manfaat Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			
ASET NETO			

2) Realisasi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi			
Iuran Jatuh Tempo:			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Pendapatan di Luar Investasi			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain			
Jumlah Penambahan			
PENGURANGAN			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Beban di Luar Investasi dan Operasional			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Pajak Penghasilan			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Jumlah Pengurangan			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO			
ASET NETO AWAL PERIODE			
ASET NETO AKHIR PERIODE			

3) Realisasi Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Deviasi
				(2)-(1)
1.	Asumsi Tingkat Bunga Aktuaria (khusus PPMP) (%)			
2.	Asumsi Metode Perhitungan Aktuaria			
3.	Asumsi Tingkat Mortalita			
4.	Target Tingkat hasil investasi dalam Arahkan Investasi (%)			

5.	dst (asumsi lain yang relevan)			
----	--------------------------------	--	--	--

4) Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Pencapaian %
	(1)	(2)	(2)/(1)
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)			
Rasio Solvabilitas (Khusus PPMP)			

3. Informasi Lainnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* *Düisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

4. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

.....

.....

.....

G. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____, _____ 20xx

Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

Nama Jelas

Jabatan

.....
.....
.....
.....

(diisi penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun , apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Dana Pensiun terdapat penurunan kinerja).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA Pensiun

YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM Pensiun

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

K e p a d a

Yth. Direktur IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN/ DATA ELEKTRONIK
DANA Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah/
UNIT SYARIAH
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan/Laporan Bulanan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pelaksana Tugas Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM Pensiun Iuran Pasti
Laporan Aset Neto
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI SYARIAH					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Syariah Negara	1106				
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana Syariah	1111				
MTN Syariah	1112				
Efek Beragun Aset Syariah	1113				
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang manfaat sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran	402			
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Penarikan Iuran				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM Pensiun Iuran Pasti
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Negara			
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Daerah			
Reksa Dana Syariah			
MTN Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
Akumulasi Iuran			
Hasil Usaha			
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
TOTAL LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI			
Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Fee Kepada Pendiri			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Penarikan Iuran			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESEERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(2) Peserta Pasif (yang Berhak Atas Manfaat Pensiun Ditunda)			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(3) Jumlah Peserta DPLK (1) + (2)			
(4) Jumlah seluruh pemberi kerja (perusahaan) yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Bank Indonesia												
Surat Berharga Syariah Negara												
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Sukuk Daerah												
Reksa Dana Syariah												
MTN Syariah												
Efek Beragun Aset Syariah												
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Syariah Negara										
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Daerah										
Reksa Dana Syariah										
MTN Syariah										
Efek Beragun Aset Syariah										
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan
Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM Pensiun Iuran Pasti
Laporan Hasil Investasi Program Manfaat Lain
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Syariah Negara										
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Daerah										
Reksa Dana Syariah										
MTN Syariah										
Efek Beragun Aset Syariah										
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun Peningkatan/Penurunan
Nilai Investasi pada sheet LPAN

(dalam rupiah)											
Uraian	Jatuh Tempo < 1 tahun		1 tahun ≤ Jatuh Tempo < 5 tahun		5 tahun ≤ Jatuh Tempo < 10 tahun		Jatuh Tempo ≥ 10 tahun		Total		Total
	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	Rupiah	Non Rupiah	
A. Aset Investasi											
Tabungan pada Bank											
Deposito on call pada Bank											
Deposito berjangka pada Bank											
Sertifikat deposito pada Bank											
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia											
Surat Berharga Syariah Negara											
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia											
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia											
Sukuk Daerah											
Reksa Dana Syariah											
MTN Syariah											
Efek Beragun Aset Syariah											
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif											
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif											
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia											
REPO											
Penyertaan langsung											
Tanah di Indonesia											
Bangunan di Indonesia											
Tanah dan Bangunan di Indonesia											
Total Investasi											
B. Aset Lancar di Luar Investasi											
Kas & Bank											
Beban Dibayar di Muka											
Piutang Investasi											
Piutang Hasil Investasi											
Piutang Lain-Lain											
Total Aset Lancar Diluar Investasi											
C. Total Aset (A+B)											
D. Liabilitas Manfaat Pensiun											
Akumulasi Iuran											
Hasil Usaha											
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain											
E. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun											
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo											
Utang Manfaat Sukarela											
Utang Investasi											
Pendapatan Diterima di Muka											
Beban yang Masih Harus Dibayar											
Utang Lain											
Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun											
F. Total Liabilitas (D+E)											
G. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H)											
H. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana											

Rincian Investasi Pada Satu Pihak

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahkan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:

Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun Syariah/ unit syariah. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari

- a. Saham Syariah dengan emiten yang teridentifikasi pailit
- b. Reksa Dana Syariah yang teridentifikasi diperdagangkan secara tidak wajar
- c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
- d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang dibawah investment grade.
- e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Sukuk korporasi ataupun bagi hasil Deposito.
- f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
- g. Surat utang yang direstrukturisasi
- h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
A. (Total Pendapatan Investasi+Pendapaatn diluar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban diluar Investasi dan operasional)				
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A:B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
A. Piutang Iuran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. Iuran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A:B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. $(SPI_n - SPI_{n-1}) \times 100\%$				
B. SPI_{n-1}				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Likuiditas minimum/cash ratio				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + -Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A:B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Piutang Iuran terhadap Aset Neto				
A. Piutang Iuran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang Iuran Mandiri (Piutang Iuran Pemberi Kerja + Iuran Tambahan)				
A. (Total Piutang Iuran Mandiri t1 - total Piutang Iuran Mandiri t0) X 100%				
B. total Piutang Iuran Mandiri t0				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Beban Usaha				1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3) Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A:B)				

Format- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi)	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)	
1					1.								
					2.								
					3. dst								
2					1.								
					2.								
					3. dst								
dst.					1.								
					2.								
					3. dst								
Total													

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	k
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi			Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai		%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k	l	m	n	o	p
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
...																
Total																

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensium/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM SYARIAH

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SUKUK KORPORASI

No	Nama Emiten/ Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor/Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ kPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK DAERAH

No	Nama Emiten/ Penerbit	Kode Sukuk Daerah	Nama Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor/Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ kPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana Syariah *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Nilai j	% k		Swakelola/ KPD m	Nama Manajer Investasi n	
1														o
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf di:
Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan	
								Awal	Akhir			k	l			Nilai	%		o
1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK SYARIAH YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	Counterparty	Jenis Jaminan (SBSN/SBIS)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSE/BIS4)	Nilai Perolehan	Margin		Amortized Cost	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Persiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan (1)	Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan Pertanggal laporan			Nilai Appraisal/wajar			Selisih Penilaian Investasi			Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan (v)								Presentase Kepemilikan (e1)					Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta Dp	Lainnya
	Swakelola/KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensiun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta Dp	Lainnya	Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung (2)	Total Modal Disetor Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung	Pendiri	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Titipan		
	s	t	u	v	w	x	y	z	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	i1	j1	k1
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

*)
huruf e :
Disisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Appraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KIPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Total																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas>Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN LIABILITAS MANFAAT Pensiun JATUH TEMPO

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT Pensiun Sukarela Jatuh Tempo

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran

No.	Nama Kelompok/ Individu	PhDP	Penerimaan Iuran		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Pendapatan di Luar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Investasi Lain	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
 Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT II B
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA Pensiun Lembaga Keuangan yang menjalankan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

Nama Dana Pensiun	:	
Nomor Buku Daftar Umum (NBDU)	:	
Nomor SID	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	

B. Pendiri

Nama Pendiri	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	
j. Bidang Usaha Pendiri	:	
k. Status Kepemilikan Pendiri (BUMN/Non BUMN)	:	

C. Penyelenggaraan

1. Kepengurusan	
a. Apakah terdapat perubahan Pelaksana Tugas Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Pengurus selama periode kegiatan?	

Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
b. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun	
c. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?	
d. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus memiliki bukti keahlian di bidang keuangan syariah?	
e. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
f. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas Syariah atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas syariah selama periode kegiatan	
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?	
g. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki surat rekomendasi dari DSN-MUI?	
h. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki surat Keputusan Pendiri atas penunjukan?	
i. Apakah jumlah dan komposisi Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah sudah sesuai dengan PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun?	
j. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat	

Bidang Investasi dan/atau
Manajemen Risiko?

2. Jumlah Karyawan Dana
Pensiun Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

SD :

SMP :

SMA :

Diploma :

S1 :

S2 :

S3 :

Total :

3. Daftar Nama dan Jabatan Karyawan Dana Pensiun yang Berada dibawah Struktur Organisasi Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Jabatan

4. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:

- a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?

Jika Ya, isi informasi nama
Pengelola administrasi
kepesertaan:

1

2

3

4

5 dst

- b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan

Jika Ya, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan

1

2

3

4

5 dst

- c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi?

Jika Ya, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi aset yang dikelola)

1

2

3

4	
5 dst	
d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?	
Jika Ya, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:	
1	
2	
3	
4	
5 dst	
5. Iuran	
a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?	
b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?	
c. Apakah terdapat iuran sukarela dari Peserta?	
6. Manfaat Lain	
Apakah Dana Pensiun menyelenggarakan program Manfaat Lain bagi Peserta?	
7. Investasi	
a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	
b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta?	
8. Tata Kelola	
a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun?	
b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun?	
c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman Tata Kelola	
D. Kepesertaan Dana Pensiun	
1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan::	
Peserta Kumpulan/ dari :	
Pemberi Kerja (orang)	
a. Program Pensiun :	
b. Manfaat Lain :	
Peserta Mandiri (orang)	
a. Program Pensiun :	
b. Manfaat Lain :	

Total (orang)	:	
a. Program Pensiun	:	
b. Manfaat Lain	:	
2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas program pensiun ditunda pada akhir periode kegiatan	:	
3. Struktur Usia Peserta Aktif program pensiun		
a. Jumlah Peserta Aktif		
s.d 20	:	
20 s.d 30	:	
30 s.d 40	:	
40 s.d 50	:	
di atas 50	:	
b. Jumlah Peserta yang berhak atas program pensiun ditunda		
s.d 20	:	
20 s.d 30	:	
30 s.d 40	:	
40 s.d 50	:	
di atas 50	:	
Estimasi jumlah peserta program pensiun yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya	:	
4. Jumlah seluruh pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan	:	

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak Program Pensiun

Uraian	Jumlah	≤ Rp 1.600.000, 00	> Rp 1.600.000, 00	≤ Rp 500.000.000, 00	> Rp 500.000.000, 00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%)	-				
i. Pensiunan					

ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun perbulannya di bawah batas ketentuan menteri					
ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					

Pernyataan Pelaksana Tugas Pengurus

Kami Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Pelaksana Tugas Pengurus
- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst								

- 2) Rangkap jabatan Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

- 3) Frekuensi rapat Pelaksana Tugas Pengurus yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pelaksana Tugas Pengurus (... kali rapat)		% Kehadir an
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Pelaksana Tugas Pengurus dengan sesama anggota Pelaksana Tugas Pengurus lain, dan/atau Dewan Pengawas DPLK di Dana Pensiun tempat anggota Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Pelaksana Tugas Pengurus Lainnya			Dewan Pengawas DPLK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

b. Dewan Pengawas

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

- 3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)	% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran	

			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas lain dan/ atau anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

- 3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadir an
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, dan/atau anggota Dewan Pengawas tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Sesama Dewan Pengawas Syariah Lainnya			anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK			anggota Dewan Pengawas		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst										

Keterangan:

* Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

- d. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas
Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Hasil Pengawasan	Rekomendasi

* Diisi dengan rincian penilaian Dewan Pengawas tentang penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Dana Pensiun

- e. Komite-Komite

- 1) Fungsi di bawah Pelaksana Tugas Pengurus DPLK

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi Audit internal	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

f. Penerapan fungsi audit eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas *)			

Keterangan:

* Tanggal Penunjukan oleh Dewan Pengawas

- g. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan. Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pelaksana Tugas Pengurus	Jumlah Dewan Pengawas	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar				
Rp500 juta ke bawah				

Keterangan:

* yang diterima secara tunai

- h. Alih Daya Pengelolaan Investasi *)

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
dst					

Keterangan:

* Dana Pensiun hanya melakukan Alih Daya Pengelolaan Investasi dalam bentuk KPD

- i. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian audit eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait **)			
3.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung			
4.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
5.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
6.	Dana Pensiun memiliki audit internal			
7.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
9.	Dana Pensiun memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT ***)			

- * pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”
- ** Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan
- *** Jelaskan dan cantumkan informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman APU PPT

2. **Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun**

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut

DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

A. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai.	A	B	C	D	E
2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain :					
2.1.Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.	A	B	C	D	E
2.2.Kebijakan bagi organ Dana Pensiun.	A	B	C	D	E
2.3.Kebijakan bagi pegawai.	A	B	C	D	E
2.4.Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun.	A	B	C	D	E
2.5.Kebijakan bagi mitra usaha.	A	B	C	D	E
2.6.Kebijakan bagi sesama dana pensiun.	A	B	C	D	E
3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis.	A	B	C	D	E
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.Benturan kepentingan.	A	B	C	D	E
4.2.Pemberian hadiah dan donasi.	A	B	C	D	E
4.3.Kepatuhan terhadap peraturan.	A	B	C	D	E

4.4.Kerahasiaan informasi.	A	B	C	D	E
4.5.Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor.	A	B	C	D	E
5. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun :					
5.1.Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan.	Tidak				Ya
5.2.Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan Dana Pensiun.	Tidak				Ya
5.3.Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.	Tidak				Ya
6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun.	Tidak				Ya
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	A	B	C	D	E

B. ORGAN DANA PENSIUN

a. Pendiri

Pendiri sesuai dengan fungsinya telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1.Internal kontrol.	A	B	C	D	E
1.2.Manajemen risiko.	A	B	C	D	E
1.3.Implementasi GCG.	A	B	C	D	E
1.4.menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	A	B	C	D	E

b. Pelaksana Tugas Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Pengurus

1.1. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus dan dalam pengelolaannya Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.	Tidak	Ya
1.2. Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak	Ya
1.3. Pelaksana Tugas Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti :		
1.3.a Bidang investasi.	Tidak	Ya
1.3.b Bidang Manajemen risiko.	Tidak	Ya

2. Persyaratan Pelaksana Tugas Pengurus

2.1. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar.	Tidak	Ya			
2.2. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas.	Tidak	Ya			
2.3. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus harus memahami dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	A	B	C	D	E
2.4. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun.	Tidak	Ya			
2.5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama.	Tidak	Ya			

- 2.6. Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan anak tempat penyertaan dana pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

TidakYa
- 2.7. Pelaksana Tugas Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain.

TidakYa

3. Fungsi Pelaksana Tugas Pengurus

3.1. Kepengurusan

- 3.1.1. Pelaksana Tugas Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun.

A B C D E
- 3.1.2. Pelaksana Tugas Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.

A B C D E
- 3.1.3. Pelaksana Tugas Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.

A B C D E
- 3.1.4. Pelaksana Tugas Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

A B C D E

3.1.5. Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.	Tidak	Ya			
3.2. Manajemen Risiko					
3.2.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun.	A	B	C	D	E
3.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	Tidak	Ya			
3.3. Pengendalian Internal					
3.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal.	Tidak	Ya			
3.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.	Tidak	Ya			
3.4. Teknologi Informasi					
3.4.1. Dana Pensiun memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu.	A	B	C	D	E
3.4.2. Dana Pensiun memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> untuk bagian Teknologi Informasi.	A	B	C	D	E
4. Pertanggungjawaban Pelaksana Tugas Pengurus					

4.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan.	Tidak	Ya
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :		
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :		
a. Laporan keuangan.	Tidak	Ya
b. Laporan kegiatan Dana Pensiun.	Tidak	Ya
c. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	Tidak	Ya
4.2.2. Mendapat persetujuan Pendiri.	Tidak	Ya
4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri.	Tidak	Ya
4.3. Rapat Pelaksana Tugas Pengurus		
4.3.1 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pelaksana Tugas Pengurus DPLK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.	Tidak	Ya
4.3.2 Pelaksana Tugas Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Tidak	Ya
4.3.3 Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan tata tertib rapat.	Tidak	Ya
4.3.4 Setiap rapat Pelaksana Tugas Pengurus dibuat risalah rapat.	Tidak	Ya
4.3.5 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting</i>	A	B C D E

opinion) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada).

4.3.6 Setiap anggota Pelaksana Tugas Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan Risalah Rapat Pelaksana Tugas Pengurus.	Tidak	Ya
--	-------	----

c. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak	Ya
1.2. Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya.	Tidak	Ya
1.3. Tidak merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang sama, atau Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang lain.	Tidak	Ya

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas

2.1. Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i> .	Tidak					Ya
2.2. Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	A	B	C	D	E	
2.3. Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain, yang dapat merugikan Dana Pensiun.	Tidak					Ya

3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas

3.1. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.	A	B	C	D	E
3.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.	Tidak			Ya	
3.3. Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tidak			Ya	
3.4. Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.	Tidak			Ya	
3.5. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat.	A	B	C	D	E
3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.	Tidak			Ya	

d. Dewan Pengawas Syariah

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

1.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak			Ya	
1.2. merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pengangkatannya harus dinyatakan secara jelas dalam surat keputusan Pendiri.	Tidak			Ya	
1.3. Seluruh Dewan Pengawas Syariah terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki	Tidak			Ya	

kompetensi yang relevan dengan jabatannya.									
1.4.	Tidak merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.	Tidak						Ya	
1.5.	Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya.	Tidak						Ya	
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas Syariah									
2.1.	Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i> .	Tidak						Ya	
2.2.	Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	A	B	C	D	E			
2.3.	Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.	Tidak						Ya	
3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah									
3.1.	Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.	A	B	C	D	E			
3.2.	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen	A	B	C	D	E			
3.3.	Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tidak						Ya	
3.4.	Setiap rapat Dewan Pengawas Syariah dibuat risalah rapat.	Tidak						Ya	
3.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat.	A	B	C	D	E			

3.6. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.	Tidak	Ya
3.7. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun.	Tidak	Ya
3.8. Dalam hal jumlah DPS adalah 1 (satu) orang maka rapat DPS dilakukan bersama dengan rapat Dewan Pengawas Dana Pensiun.	Tidak	Ya
4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)	Tidak	lanjutkan ke
4.1. Komite Audit	Ada	4.1.7.
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:		
4.1.1. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.	A	B C D E
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	A	B C D E
4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B C D E
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Tidak	Ya
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B C D E
4.1.6. Anggota Komite Audit terdiri dari :		
a. anggota Dewan Pengawas.	Tidak	Ya

b. pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tidak	Ya
--------------	-----------

4.1.7. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.
- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|
- b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|
- c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.
- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|
- d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- | | |
|--------------|-----------|
| Tidak | Ya |
|--------------|-----------|
- e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.
- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | D | E |
|----------|----------|----------|----------|----------|

4.2. Komite Pemantau Risiko

Tidak
Ada

lanjutkan ke
4.2.4.

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko.

A

B

C

D

E

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pelaksana Tugas Pengurus.

A

B

C

D

E

4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta.

Tidak

Ya
- b. pihak lain.

Tidak

Ya

4.2.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. menilai kualitas kebijakan manajemen risiko.

A

B

C

D

E
- b. menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pelaksana Tugas Pengurus.

A

B

C

D

E

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak
Ada

lanjutkan ke
4.3.4.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan

A

B

C

D

E

- Pengawas dan Pelaksana
Tugas Pengurus Dana
Pensiun.
- 4.3.2. Fasilitator bagi Dewan
Pengawas dalam membantu
Pendiri untuk menetapkan
sistem remunerasi.
- A

B

C

D

E
- 4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:
- a. anggota Dewan
Pengawas.

Tidak

Ya
- b. pihak lain.

Tidak

Ya
- 4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite
Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Dewan
Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal
sebagai berikut :
- a. Membantu Pendiri
menetapkan kriteria dan
memilih calon Dewan
Pengawas dan Pelaksana
Tugas Pengurus Dana
Pensiun.

A

B

C

D

E
- b. Membantu Pendiri untuk
menetapkan sistem
remunerasi.

A

B

C

D

E

C. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik)
melakukan pemeriksaaan secara independen
terhadap kebenaran laporan keuangan Dana
Pensiun.

Tidak

Ya
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak

Ya

3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Nama Dana Pensiun.....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
TAHUN

a. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis <i>Fraud</i> <i>a)</i>	Tanggal terjadinya <i>Fraud</i> <i>d)</i>	Divisi/ Bagian Terjadi- nya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat <i>b)</i>	Jabatan	Kerugian dalam rupiah <i>c)</i>	Tindakan Dana Pensiun <i>d)</i>	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> <i>e)</i>	Tindak Lanjut / Perbaikan <i>f)</i>	Kronologis kejadian <i>Fraud</i> <i>g)</i>

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

1) Pencegahan:

.....

.....

.....

2) Deteksi:

.....

.....

.....

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

.....

.....

.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....

.....

.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a)* Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Dana Pensiun,atau lainnya.
- b)* Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c)* Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d)* Tindakan Dana Pensiun merupakan respon Dana Pensiun atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan

antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Dana Pensiun yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Dana Pensiun.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Dana Pensiun terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

III. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Dana Pensiun	:	
Skema Penyelenggaraan	:	[1] Syariah Penuh (<i>Full Fledged</i>)
PPBS		[2] Unit Syariah DPLK
		[3] Paket Investasi Syariah DPLK
Periode Laporan	:	s.d.
Tanggal Laporan	:	

INFORMASI UMUM

1.

Nama Dana Pensiun

:
2.

Jenis Dana Pensiun

:

(1) DPPK PPMP

(2) DPPK PPIP

(3) DPLK
3.

Skema Penyelenggaraan PPBS

:

(1) Syariah Penuh (*Full Fledged*)

(2) Unit Syariah DPLK

(3) Paket Investasi Syariah DPLK
4.

Alamat Dana Pensiun

:
5.

Susunan DPS

:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Surat Keputusan Penunjukan DPS	
			Nomor	Tanggal
1.				
2.				
dst				

6.

Ringkasan korespondensi dan/atau notulen rapat terkait hasil pelaksanaan pengawasan DPS

No	Korespondensi dan/atau notulen rapat			Ringkasan Substansi
	Nomor	Tanggal	Hal	
1.				
2.				
dst				

7.

Informasi mengenai penyusun laporan (*contact person*):

a.

Nama

:

b.

Jabatan

:

c.

Nomor Telepon

:

d.

Alamat E-mail

:

PERNYATAAN DPS

a. APABILA TIDAK DITEMUKAN PRAKTIK YANG MELANGGAR

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan PPBS yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek Manfaat Pensiun, aspek Manfaat Lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Tanda Tangan

b. APABILA DITEMUKAN PRAKTIK YANG BELUM SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan PPBS yang dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud yang meliputi aspek Akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek penempatan investasi, aspek Manfaat Pensiun, aspek Manfaat Lain dan kegiatan lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK telah melakukan praktik pengelolaan yang belum sesuai Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami pelaksanaan hal tersebut oleh Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK belum sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ringkasan Praktik yang Belum Sesuai dengan Prinsip Syariah

No.	Praktik	Periode Kejadian	Faktor Penyebab	Keterangan

.....(Nama Kota),.....(tanggal-bulan-tahun)

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

RINGKASAN HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kami terhadap penerapan Prinsip Syariah dalam operasional penyelenggaraan PPBS pada Dana Pensiun Syariah..../Unit Syariah DPLK /Paket Investasi Syariah DPLK selama periode tanggal.....sampai dengan....., dapat disampaikan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Akad yang Digunakan

<u>Pokok Materi 1:</u> Kesesuaian Akad yang digunakan dengan kegiatan PPBS Keterangan Status: Rekomendasi:	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penggunaan Akad dalam kegiatan PPBS Keterangan Status: Rekomendasi:	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Pokok Materi 3:</u> Penetapan <i>ujrah</i> /nisbah yang wajar dan transparan dalam kegiatan PPBS Keterangan Status: Rekomendasi:	<u>Status Kesesuaian:</u>

B. Pengelolaan Iuran

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur kepesertaan pada PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penerapan sistem dan prosedur pengenaan sanksi (<i>ta'zir</i>) dan penggunaan Dana <i>Ta'zir</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

C. Penempatan Investasi

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan investasi PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pengelolaan investasi PPBS dalam hal terdapat investasi PPBS yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> Pencatatan investasi PPBS	
Keterangan:	
Rekomendasi:	

D. Pembayaran Manfaat Pensiun

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Pensiun	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

<u>Pokok Materi 2 :</u> Penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

E. Manfaat Lain (jika ada)

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan dana iuran atas Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi atas Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	

Rekomendasi:

<u>Pokok Materi 4:</u> Penghitungan dan pembayaran Manfaat Lain telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau telah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi	

F. Kegiatan Lainnya

<u>Pokok Materi 1:</u> Penerapan sistem dan prosedur penempatan kekayaan PPBS selain investasi	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan lain	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pencatatan dan pengadministrasian rekening Peserta PPBS	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> penerapan kegiatan-kegiatan lainnya yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, termasuk fatwa-fatwa DSN MUI	<u>Status Kesesuaian:</u>
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

IV. **Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan Pegawai yang Membidangi Investasi**

FORM :										
		OTORITAS JASA KEUANGAN FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI								
Nama Dana Pensiun		:								
Nomor Surat Pelaporan		:								
Tanggal Surat Pelaporan		:								
Contact Person (Nama, Telp/e-mail)		:								
NO	URAIAN				DASAR HUKUM		YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.				o POJK 3/POJK.05/2015 o POJK 5/POJK.05/2018 o POJK 29/POJK.05/2018		☐	☐		
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan						☐	☐		
Keterangan tambahan (bila diperlukan):										
No	Nama	Jenis Pihak Utama *) ***)	No dan tanggal SK FPT**)	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
		o Pelaksana Tugas Pengurus o Pegawai		o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan		o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri o asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang				sertifikat (nomor dan tanggal) bukti hadir lainnya, yaitu

				kursus, pelatiha n, atau program pendidik an sejenis						

Keterangan:

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
- 2. *) Pilih salah satu
- 3. **) Khusus untuk pelaksana tugas pengurus
- 4. ***) untuk seluruh pegawai yang membidangi investasi
- 5. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
- 6. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

FORMAT II C**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG MENJALANKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH****A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan**

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

- a. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Plt. Pengurus	
Jabatan Plt. Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:

- Nama Aktuaris;

- Nama Kantor Aktuaris;

- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;

- No. STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.

2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.

4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan

5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) No. Izin Aktuaris Publik:
--

2. Tanggal Valuasi Aktuarial

Tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuarial periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

--

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

--

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

Uraian	DD-MM-YYYY (periode pelaporan)	DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiun ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

6. Tingkat bunga yang digunakan

--

7. Proyeksi *Cash Flow*

--

8. Analisis *Actuarial Gain or Loss*

--

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

--

10. Tabel Konversi

--

11. Kesimpulan dan Saran

--

E. Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah/Unit Syariah)

	_____20xx
Disetujui,	
Dewan Pengawas	Pengurus,
(Cap Dana Pensiun)	(Cap Dana Pensiun)
<u> N a m a J e l a s </u>	<u> N a m a J e l a s </u>
Jabatan	Jabatan

DAFTAR ISI
FORMAT RENCANA BISNIS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Format 1	:	Profil Dana Pensiun Syariah/Unit Syariah
Format 2	:	Ringkasan Eksekutif
Format 3	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 4	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 5	:	Rencana Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 7	:	Rencana Investasi
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Format 12	:	Proyeksi Laporan Keuangan
Format 13	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan
Format 14	:	Informasi Lainnya

Format 1 : Profil Dana Pensiun Syariah/Unit Syariah

- 1. Informasi Umum Dana Pensiun
 - 1) Nama Dana Pensiun
 - 2) Kode Dana Pensiun
 - 3) SK Pengesahan
 - 4) Program
 - 5) Pelaksana Tugas Pengurus
 - 6) Dewan Pengawas
 - 7) Alamat Kantor
 - 8) Tanggal Pelaporan
 - 9) Tahun Rencana Bisnis
- 2. Struktur Organisasi Dana Pensiun

(Diisi dengan bagan struktur organisasi Dana Pensiun)

- 3. Informasi Umum Pendiri
 - 1) Nama Pendiri
 - 2) Alamat
 - 3) Direksi
 - 4) Dewan Komisaris
 - 5) Bergerak di bidang

Format 2 : Ringkasan Eksekutif

- 1. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....
- 2. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....
- 3. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun ¹⁾
.....
.....
.....

Keterangan :

¹⁾ antara lain meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan hasil investasi Dana

Pensiun, peningkatan manfaat pensiun atau manfaat lain, dan peningkatan efisiensi Dana Pensiun

4. Indikator Keuangan

(dalam satuan penuh rupiah)

No	Uraian	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset Neto				
2.	Aset Investasi				
3.	Pendapatan Investasi				
4.	Beban Investasi				
5.	Beban Operasional				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

5. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Dana Pensiun

.....
.....
.....

** Uraian mengenai kondisi keuangan Dana Pensiun yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

6. Rasio Keuangan

No	Uraian	Kinerja Sept X-1 (%)	Proyeksi (%)		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
2.	Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)				
3.	Rasio Beban Operasional (BOPO)				

Format 3 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

1. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun ***(Abaikan jika Dana Pensiun anda Dana Pensiun baru dan/atau pertama kali dalam penyampaian laporan rencana bisnis).***

(Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana bisnis setiap tahun. Pada bagian ini, Dana Pensiun dapat melihat kinerja Dana Pensiun pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Dana Pensiun)

Indikator	20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	Pencapaian %
	(1)	(2)	(2 / 1)
Aset Neto			
Aset Investasi			
Pendapatan Investasi			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			

2. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah

.....
.....
.....

** Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan solusi dari pemecahan masalah tersebut*

3. Upaya Pemecahan Masalah

.....
.....
.....

** Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

Format 4 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Dana Pensiun *

.....

.....

.....

* Visi merupakan gambaran kondisi Dana Pensiun di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita Dana Pensiun. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Dana Pensiun ke depan.

2. Misi Dana Pensiun

.....

.....

.....

* Misi merupakan penjabaran dari visi, dimana misi menjabarkan analisis yang cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh Peserta. Misi juga menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Dana Pensiun ke depan..

3. Strategi Bisnis Dana Pensiun

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a)	1)
			2)
		b)	1)
			2)
		c) dst	dst
2.		a)	1)
			2)
		b)	1)
			2)
		c) dst	dst
dst	dst	dst	dst

Format 5 : Rencana Kegiatan Usaha

.....

.....

.....

.....

.....

(Rencana mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud)

Format 6 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha Baru	Keterkaitan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis Perusahaan	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru	Alasan dan Pertimbangan	Strategi

Keterangan:

- a. Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha Dana Pensiun, paket investasi, Manfaat Lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Sesuai dengan POJK tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dapat diisi mengenai manfaat lain.

Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:

- a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau
- b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti perubahan penawaran paket investasi bagi DPLK.

Format 7 : Rencana Investasi

1. Komposisi Investasi

1) Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Syariah Negara								
7.	Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Daerah								
10.	Reksa Dana Syariah								
11.	MTN Syariah								
12.	Efek Beragun Aset Syariah								
13.	Dana investasi real estat								

	syariah berbentuk kontrak investasi kolektif								
14.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
16.	REPO								
17.	Penyertaan langsung								
18.	Tanah di Indonesia								
19.	Bangunan di Indonesia								
20.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2) Berdasarkan Nilai Wajar

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip								

	Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Syariah Negara								
7.	Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Daerah								
10.	Reksa Dana Syariah								
11.	MTN Syariah								
12.	Efek Beragun Aset Syariah								
13.	Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif								
14.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
16.	REPO								
17.	Penyertaan langsung								

	Bang unan di Indo nesia																
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Pertimbangan yang mendasari rencana investasi

.....
.....
.....

(Diisi dengan pertimbangan atau asumsi yang digunakan Pengurus sebagai dasar dalam menentukan rencana investasi sesuai dengan yang diatur dalam POJK tentang Investasi Dana Pensiun)

Format 8 : Rencana Pendanaan

(Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta))

1. Proyeksi Iuran

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Iuran Pemberi kerja				
Iuran Peserta				
Total Dana Iuran				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

2. Proyeksi Jumlah Peserta

1) Tabel Jumlah Peserta

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Peserta Program Pensiun				
Peserta Manfaat Lain				
Total Peserta				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis

2) Alasan dan Pertimbangan *

.....

.....

.....

* diisi dengan penjelasan peserta yang menjadi target, apakah peserta individu atau kelompok, serta sebaran wilayah yang dituju

3) Strategi *

.....

.....

.....

* diisi dengan strategi untuk mencapai jumlah target kepesertaan tersebut

Format 9 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

(Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.)

No	Perubahan Jaringan Kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Penggabungan				
1.				
2.				
C. Perubahan Alamat				
1.				
2.				
Dst				
D. Penutupan Kantor				
1.				
2.				
Dst				

Keterangan:

¹ Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

Total											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia

3) Strategi*

.....

.....

.....

* Diisi dengan stategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia

3. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas, dan pegawai

1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Materi/Topik	Nama Peserta	Jabatan	Sertifikasi yang telah dimiliki	Waktu Pelatihan
1.					
2.					
Dst.					

2) Alasan dan Pertimbangan

.....

.....

.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia

3) Strategi

.....

.....

.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....
.....
.....

* *Diisi dengan alasan/ pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi*

.....
.....
.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

5. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi
1.				
2.				

* *Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan/atau pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Dana Pensiun. Selain itu perlu diisi informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi.*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....
.....
.....

* Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

3) Strategi*

.....
.....
.....

* Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

Format 11 : Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

1. Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Bentuk laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat mengacu pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

1) Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1.	Nama Kegiatan	 (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)

2.	Tujuan Kegiatan	 <i>(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)</i>		
3.	Bentuk Pelaksanaan	Edukasi Keuangan ☐ Sosialisasi ☐ <i>Workshop</i> ☐ Konsultasi ☐ Pendampingan ☐ Simulasi ☐ <i>Training of Community</i> ☐ <i>Outreach program</i> ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Pengembangan Infrastruktur ☐ <i>Training of trainers</i> ☐ <i>Training of facilitators</i> ☐ Pengembangan <i>e-learning</i> ☐ Pengembangan <i>website</i> ☐ Pengembangan aplikasi <i>mobile</i> ☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>		
4.	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	Metode Pelaksanaan Langsung ☐ Tatap muka ☐ Siaran langsung dengan	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah ☐ pelaksanaan kegiatan (<i>pre</i> dan <i>post test</i>)	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online

		sarana: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur	☐ Lainnya: ... (sebutkan)
--	--	---	--	--

			☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
		Metode Pelaksanaan Tidak langsung, melalui media ☐ Elektronik: ... (sebutkan) ☐ Cetak ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... (sebutkan)

		Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre</i> dan <i>post test</i>) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
5.	Materi	a. Pengelolaan Keuangan, meliputi: ☐ Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan ☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi	

		pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan Jenis industri jasa keuangan: ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan ☐ Lembaga penjaminan ☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐ Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya ... <i>(sebutkan)</i> c. Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
--	--	--

6.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh ☐ Profesional: ... (sebutkan) ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) (beri tanda pada salah satu pilihan)
7.	Jumlah Peserta	... orang (diisi dengan jumlah peserta)
8.	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai ... selesai ... (diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)

9.	Wilayah Pelaksanaan	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota
----	---------------------	---

		... <i>(diisi apabila ada)</i> Wilayah Lainnya ... <i>(diisi apabila ada)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
10.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali
11.	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
12.	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... <i>(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)</i>
13.	Parameter Pemantauan :	Edukasi Keuangan ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur

		☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
14.	Bentuk Pemantauan	<i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i> ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
15.	Parameter Evaluasi	Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
16.	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola

		☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
17.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terencana dan Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16</i>
2.	Berorientasi pada Pencapaian	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11</i>
3.	Berkelanjutan	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9</i>

4.	Kolaborasi	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..
----	------------	---

2) Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Realisasi	Keterangan
1.	Nama Kegiatan	 (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)	
2.	Tujuan Kegiatan	 (diisi dengan tujuan kegiatan yang dicapai oleh PUJK)	
3.	Bentuk Pelaksanaan	Edukasi Keuangan ☐ Sosialisasi ☐ Workshop ☐ Konsultasi ☐ Pendampingan ☐ Simulasi ☐ Training of Community ☐ Outreach program ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Pengembangan Infrastruktur ☐ Training of trainers ☐ Training of facilitators ☐ Pengembangan e-learning ☐ Pengembangan website ☐ Pengembangan aplikasi mobile ☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan)	

		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>			
4.	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	Metode Pelaksanaan Langsung ☐ Tatap muka ☐ Siaran langsung dengan sarana: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah dan setelah pelaksanaan kegiatan <i>(pre dan post test)</i> ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat , ☐ kemudahan materi dipahami, kesesuaian dengan sasaran , ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	

		☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur		
--	--	---	--	--

			☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>		
		Metode Pelaksanaan Tidak langsung, melalui media ☐ Elektronik: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Cetak ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan <i>(pre dan post test)</i> ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat , ☐ kemudahan materi dipahami,	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	

			☐ kesesuaian dengan sasaran , ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Lainnya: ... (sebutkan)		
--	--	--	--	--	--

		Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
5.	Materi	a. Pengelolaan Keuangan, meliputi: ☐ Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan ☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	

		b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan Jenis industri jasa keuangan: ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan ☐ Lembaga penjaminan ☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐ Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) c. Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
6.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan	

		☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh ☐ Profesional: ... (sebutkan) ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) (beri tanda pada salah satu pilihan)	
7.	Jumlah Peserta	... orang (diisi dengan jumlah peserta)	
8.	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai ... selesai ... (diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)	

9.	Wilayah Pelaksanaan	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota	
----	---------------------	---	--

		... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
10.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali	
11.	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan)	
12.	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... (diisi dengan realisasi jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)	
13.	Parameter Pemantauan :	Edukasi Keuangan ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur	

		☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
14.	Bentuk Pemantauan	<i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i> ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
15.	Parameter Evaluasi	Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
16.	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola	☐

		☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
17.	Hasil Pengukuran	(secara sistem akan mengacu pada metode pengukuran yang digunakan dilengkapi dengan hasil pengukuran) Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Meningkat, ...%☐ Tetap☐ Menurun, ...% ☐ ...% hasil dari jajak pendapat (sesuai dengan topik jajak pendapat yang dilakukan) ☐ ...% hasil survei tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu (sesuai dengan kelompok yang ditentukan) ☐ ... (diisi dengan hasil pengukuran lainnya) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Meningkat, ...%☐ Tetap☐ Menurun, ...% ☐ Lainnya: ...(sebutkan) Non-SDM ☐ ...% penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ ...% hasil penilaian target tertentu dalam uji kesesuaian hasil pengembangan fungsi infrastruktur	

		☐ Lainnya: ... (diisi dengan hasil pengukuran lainnya)	
18.	Hasil Pemantauan	Hasil Pemantauan (secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian) ☐ Sesuai rencana, ... (deskripsi) ☐ Tidak sesuai rencana, ... (deskripsi)	☐
19.	Hasil Evaluasi	... (deskripsi hasil pengukuran dikaitkan dengan hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan) Hasil Evaluasi (secara sistem akan mengacu pada parameter evaluasi dilengkapi dengan pilihan penyesuaian) Edukasi Keuangan ☐ Meningkat, ... (deskripsi) ☐ Tetap, ... (deskripsi) ☐ Menurun, ... (deskripsi) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kemampuan trainers/ fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Baik, ... (deskripsi) ☐ Cukup baik, ... (deskripsi) ☐ kurang baik ... (deskripsi) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Ketersediaan infrastruktur: ☐ Tersedia dalam bentuk: ... (sebutkan) ☐ Tidak tersedia ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur: ☐ Sesuai: ... (deskripsi) ☐ Tidak sesuai ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	☐

20.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>	☐
-----	------------	--	--------------------------

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terencana dan Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 –12 serta 13 –14 dan/atau 15 –16</i>
2.	Berorientasi pada Pencapaian	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11</i>
3.	Berkelanjutan	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9</i>
4.	Kolaborasi	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 20 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..</i>

2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Bentuk laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat mengacu

pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

1) Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1.	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (beri tanda pada salah satu pilihan)
2.	Nama Kegiatan	... (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)
3.	Bentuk Pelaksanaan	Perluasan Akses ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penciptaan skema: ... (sebutkan) ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan)

		(beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)
4.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)
5.	Target Pengguna	Jumlah ... pengguna (diisi dengan jumlah pengguna)

6.	Jadwal	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>
7.	Wilayah	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia

		(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota ... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)
8.	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi

		☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
9.	Bentuk Pemantauan	Bentuk Pemantauan (mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan) ☐ Lapangan ☐ Melalui laporan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) dilakukan secara (mengacu pada bentuk pemantauan) ☐ Bulanan ☐ Triwulanan

		☐ Tahunan ☐ Periode lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
10.	Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
11.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 2. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2), dst.</i> ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 2. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2), dst.</i> <i>(diisi apabila ada)</i> Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ...</i> <i>(deskripsi)</i>

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
----	---------	-------------------

1.	Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10
2.	Terjangkau	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8
3.	Tepat Sasaran	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5
4.	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7

2) Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1.	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
2.	Nama Kegiatan	... <i>(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)</i>	
3.	Bentuk Pelaksanaan	Perluasan Akses ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... <i>(sebutkan)</i>	

		☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penciptaan skema: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
4.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	

		<i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
5.	Target Pengguna	... pengguna <i>(diisi dengan jumlah pengguna)</i>	
6.	Jadwal	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>	
7.	Wilayah	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat	

		☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota ... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
8.	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan	

	☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi ☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan	
--	--	--

		pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
9.	Bentuk Pemantauan	Bentuk Pemantauan <i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i> ☐ Lapangan ☐ Melalui laporan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> dilakukan secara <i>(mengacu pada bentuk pemantauan)</i> ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Tahunan ☐ Periode lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
10.	Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
11.	Hasil Pemantauan	Hasil Pemantauan	

	dan/atau Evaluasi	(secara sistem akan mengacu pada parameter dilengkapi dengan hasil pemantauan)		
		Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan		
			Sebelum	Setelah
		☐ Jumlah jaringan kantor	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)
		☐ Jumlah kerja sama dengan pihak lain	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)
		☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)
		☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)
		☐ Lainnya: ... (sebutkan)	...(diisi dengan jumlah/persentase)	...(diisi dengan jumlah/persentase)
		Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan		
			Sebelum	Setelah

	☐ Jumlah jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ...(diisi dengan jumlah) ...(diisi dengan jumlah) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) ...(diisi dengan jumlah/persentase) ...(diisi dengan jumlah/persentase)													
Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan														
	<table><tr><td></td><td> Sebelum </td><td> Setelah </td></tr><tr><td> ☐ Penambahan rekening tabungan/kredit/pembiayaan/efek/dana pensiun </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td></tr><tr><td> ☐ Penambahan jumlah transaksi </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td></tr><tr><td> ☐ Penambahan jumlah polis asurans </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td><td> ...(diisi dengan jumlah) </td></tr></table>		Sebelum	Setelah	☐ Penambahan rekening tabungan/kredit/pembiayaan/efek/dana pensiun	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)	☐ Penambahan jumlah transaksi	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)	☐ Penambahan jumlah polis asurans	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)	
	Sebelum	Setelah												
☐ Penambahan rekening tabungan/kredit/pembiayaan/efek/dana pensiun	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)												
☐ Penambahan jumlah transaksi	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)												
☐ Penambahan jumlah polis asurans	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)												

	☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ...(diisi dengan jumlah) ...(diisi dengan jumlah) ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ...(diisi dengan jumlah) ...(diisi dengan jumlah) ☐ Penambahan transaksi gadai ...(diisi dengan jumlah) ...(diisi dengan jumlah) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) ...(diisi dengan jumlah) ...(diisi dengan jumlah)							
	Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat <table><tr><td></td><td>Sebelum</td><td>Setelah</td></tr><tr><td>☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa</td><td>...(diisi dengan jumlah)</td><td>...(diisi dengan jumlah)</td></tr></table>		Sebelum	Setelah	☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)	
	Sebelum	Setelah						
☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa	...(diisi dengan jumlah)	...(diisi dengan jumlah)						

		keuangan lainnya			
		☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai	...(diisi dengan kondisi)	...(diisi dengan kondisi)	
		☐ Lainnya: ... (sebutkan)	...(diisi dengan	...(diisi dengan	

		<table><tr><td></td><td>jumlah/k ondisi)</td><td>jumlah/ kondisi)</td></tr></table>		jumlah/k ondisi)	jumlah/ kondisi)	
	jumlah/k ondisi)	jumlah/ kondisi)				
		Hasil Evaluasi ... (deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan dengan peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)				
12.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. Informasi lainnya: Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)				

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10
2.	Terjangkau	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8
3.	Tepat Sasaran	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5
4.	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7

Format 12 : Proyeksi Laporan Keuangan

1. Proyeksi Laporan Aset Neto untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
ASET				
INVESTASI				
Tabungan pada Bank				
Deposito on call pada Bank				
Deposito Berjangka pada Bank				
Sertifikat Deposito pada Bank				
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah Negara				
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Daerah				
Reksa Dana Syariah				
MTN Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				
Dana investasi real estat Syariah				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
berbentuk kontrak investasi kolektif				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
REPO				
Penyertaan langsung				
Tanah di Indonesia				
Bangunan di Indonesia				
Tanah dan Bangunan di Indonesia				
TOTAL INVESTASI				
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
Kas dan Bank				
Beban Dibayar di Muka				
Piutang Investasi				
Piutang Hasil Investasi				
Piutang Lain- Lain				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
ASET TERSEDIA				
LIABILITAS				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo				
Utang Manfaat Sukarela				
Utang Investasi				
Pendapatan Diterima di Muka				
Beban yang Masih Harus di Bayar				
Utang Lain				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-		
TOTAL LIABILITAS	-	-		
ASET NETO				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst
- * Nominal Aset Neto sama dengan nominal Aset Neto Akhir Periode pada Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto.
- * Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto.

2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENAMBAHAN				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Pendapatan Investasi				
Bunga/ Bagi Hasil	-			
Dividen	-			
Sewa	-			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-			
Pendapatan Investasi Lain	-			
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi				
Iuran				
Pendapatan di Luar Investasi				
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain				
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi				
Beban Operasional				
Beban di Luar Investasi dan Operasional				
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan				
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain				
Penarikan Iuran				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.
- * Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto

Format 13 : Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan

1. Rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya

(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				
Rasio beban operasional (BOPO)				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.

2. Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
			per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1.	Nilai tukar rupiah				
2.	Tingkat inflasi				
3.	Tingkat hasil investasi				
4.	dst (asumsi lain yang relevan)				

Keterangan:

- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.

Format 14 : Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

- a. rencana pembubaran;*
- b. rencana pengalihan kepesertaan;*
- c. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan*
- d. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.*

F. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun

20xx

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

 N a m a J e l a s
Jabatan

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

 N a m a J e l a s
Jabatan

1. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1.

realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 5 dalam rencana bisnis dana pensiun;
2.

realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 6 dalam rencana bisnis dana pensiun;
3.

realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada Format 7 dalam rencana bisnis dana pensiun;
4.

realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada Format 8 dalam rencana bisnis dana pensiun;
5.

realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada Format 9 dalam rencana bisnis dana pensiun;
6.

realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Format 10 dalam rencana bisnis dana pensiun;
7.

realisasi atas proyeksi laporan keuangan, sebagaimana dimaksud pada Format 12 dalam rencana bisnis dana pensiun;
8.

realisasi atas proyeksi rasio-rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Format 13 dalam rencana bisnis dana pensiun; dan
9.

pengisian rencana bisnis berdasarkan laporan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK paling terakhir

2. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

- 1) Realisasi Laporan Aset Neto Untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
ASET			
INVESTASI			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Surat Berharga Syariah Negara			
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Daerah			
Reksa Dana Syariah			
MTN Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana investasi real estate berbetuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
TOTAL INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET TERSEDIA			
LIABILITAS			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus di Bayar			
Utang Lain			
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			
ASET NETO			

2) Realisasi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian
			% (2)/(1)
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/ Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi			

Iuran			
Pendapatan di Luar Investasi			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain			
Jumlah Penambahan			
PENGURANGAN			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Beban di Luar Investasi dan Operasional			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Pajak Penghasilan			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Penarikan Iuran			
Jumlah Pengurangan			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO			
ASET NETO AWAL PERIODE			
ASET NETO AKHIR PERIODE			

3) Realisasi Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Deviasi
				(2)-(1)
1.	Nilai tukar rupiah			
2.	Tingkat inflasi			
3.	Tingkat hasil investasi			
4.	dst (asumsi lain yang relevan)			

4) Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian %
			(2)/(1)
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian %
			(2)/(1)
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
<i>Rasio Pendanaan</i>			
<i>Rasio Solvabilitas</i>			

3. Informasi Lainnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* *Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

4. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

.....

.....

.....

G. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____, _____ 20xx

Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

Nama _____ Jelas

Jabatan

.....

.....

.....

.....

(diisi penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun , apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Dana Pensiun terdapat penurunan kinerja.)

H. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

--

I. Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit oleh Akuntan Publik Pada Situs Web DPLK dan/atau Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yang Beredar Secara Nasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RISWINANDI

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA Pensiun

YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM Pensiun

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dana Pensiun
Laporan Paket Investasi
Per DD-MM-YYYY

Nama Akun	Paket Syariah				
	Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	dst
Aset					
Aset Bersih					
Investasi					
a. Tabungan pada Bank					
b. Deposito on call pada Bank					
c. Deposito Berjangka pada Bank					
d. Sertifikat Deposito pada Bank					
e. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
f. Surat Berharga Syariah Negara					
g. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
h. Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
i. Sukuk Daerah					
j. Reksa Dana Syariah					
k. MTN Syariah					
l. Efek Beragun Aset Syariah					
m. Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif					
n. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif					
o. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
p. REPO					
q. Penyertaan langsung					
r. Tanah di Indonesia					
s. Bangunan di Indonesia					
t. Tanah dan Bangunan di Indonesia					
Aset Lancar					
a. Kas dan Bank					
b. Beban Dibayar di Muka					
c. Piutang Investasi					
d. Piutang Hasil Investasi					
e. Piutang Lain-Lain					
Liabilitas Di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun					
a. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo					
b. Utang Manfaat Sukarela					
c. Utang Investasi					
d. Pendapatan Diterima di Muka					
e. Beban yang Masih Harus Dibayar					
f. Utang Lain					
Hasil Usaha Investasi					
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi					
Jumlah peserta					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja